

**IMPLEMENTASI KEPERIBADIAN MUHAMMADIYAH DALAM  
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  
PADA MAHASISWA UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Makassar.*

Oleh :

**AKBAR ABA  
105430011915**

29/09/2020

1 sep  
Smb. Alumni

R/066/PKN/2020  
ABA  
c

**PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2020**



### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Akbar Aba** NIM 105430011915 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 114 Tahun 1442 H/2020 M pada tanggal 02 Muharram 1442 H/21 Agustus 2020 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020.

8 Safar 1442 H

Makassar

25 September 2020 M

#### Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.A.
2. Ketua : Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
3. Sekretaris : Dr. Baharullah, M.Pd.
4. Penguji
  1. Dr. Muhajir, M.Pd.
  2. Drs. Jumiaty Nur., M.Pd.
  3. Dr. Andi Sugiaty, M.Pd.
  4. Dr. A. Rahim., M.Hum.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh :

Dekan FKIP Unismuh Makassar

(.....)

**Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.**  
NBM. 860 93





## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Akbar Aba  
Stambuk : 105430011915  
Program Studi : S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Dengan Judul : **Implementasi Kepribadian Muhammadiyah Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar**

Setelah diperiksa dan diperbaiki, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan

Makassar, 25 September 2020

Disetujui oleh

Pembimbing I


Pembimbing II

  
Dr. Muhajir, M.Pd.

  
Dra. Jumiaty Nur, M.Pd.

Diketahui oleh:

Dekan FKIP  
Unismuh Makassar

  
Edwin Akib, M.Pd., Ph.D.  
NBM. 860 934

Ketua Prodi PPKn

  
Dr. Muhajir, M.Pd.  
NBM. 988 461



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Akbar Aba**  
Nim : **10543 00119 15**  
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Skripsi : **Implementasi Nilai-nilai Kemuhammadiyahan dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.**

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri, bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan

  
Akbar Aba



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

---

**SURAT PERJANJIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Akbar Aba**

Nim : **10543 00119 15**

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Skripsi : **Implementasi Nilai-nilai Kemuhammadiyah dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.**


Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesainya skripsi ini, saya yang menyusunnya sendiri (tidak dibuat oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi ini, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
4. Apabila perjanjian seperti butir 1, 2, dan 3 dilanggar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, Juli 2020

Yang Membuat Perjanjian

  
Akbar Aba



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

Berdzikir, Berpikir, dan Beramal

### **Saya persembahkan karya ini untuk:**

Kedua orang tua dan keluarga saya yang selalu memberikan doa dan dukungan, serta teman-teman yang selalu memberikan suport, dan teruntuk teman-teman IMM, BEM, HMJ PPKn FKIP Unismuh Makassar, yang kebersamai dalam suka dan duka, serta dukungan, saran, motivasi sehingga karya ini dapat diselesaikan.

## ABSTRAK

Akbar Aba. 2019. Implementasi Kepribadian Muhammadiyah dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada mahasiswa Unismuh Makassar. Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing Muhajir dan Jumiaty Nur.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah pengimplementasian Kepribadian Muhammadiyah dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan hambatan yang dihadapi pada proses pembelajaran. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dengan cara mereduksi data, menyajikan data serta memverifikasi dan membuat kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasikan nilai-nilai Muhammadiyah dalam proses pembelajaran PPKn pada mahasiswa Prodi PPKn Unismuh Makassar masih kurang baik. Adapun hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Muhammadiyah pada proses pembelajaran ialah kurangnya pemahaman beberapa dosen tentang nilai-nilai Muhammadiyah.

**Kata Kunci:** Pendidikan Kewarganegaraan, Implementasi Kepribadian Muhammadiyah.

## ABSTRAK

Akbar Aba. 2019. Implementation of Muhammadiyah Personality in the Study of Citizenship Education in Muhammadiyah university students. Thesis. Pancasila Education Study Programs Pancasila and Citizenship of the Teaching and Education Faculty of the Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Muhajir and Jumiaty Nur.

The main problem in this research are the implementation of Muhammadiyah values in the learning of Civic Education and the obstacles faced in the learning process. The kind of the research is qualitative research. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The data analysis technique used were reducing data, presenting data and verifying and making conclusions.

The results of this research concluded that implements of Muhammadiyah values in the learning process of PPKn in the students of the Muhammadiyah University of Makassar PPKn Study Programs is still not good. As for obstacles faced by researcher in implementing Muhammadiyah values to learning process are some lecturers not really understand about Muhammadiyah values.

**Keywords:** *Citizenship Education, Implementation of Muhammadiyah Values.*



## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa ta'Ala*. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini sesuai yang diharapkan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah atas Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam*, nabi yang terakhir diutus ke bumi persada ini, untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Dan dialah Nabi yang menjadi perombak peradaban Islam hingga kita dapat merasakannya saat ini.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban sebagai salah satu persyaratan guna menempuh gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Terima kasih yang teramat tulus dari relung hati yang paling dalam dipersembahkan kepada Aba dan Harsia selaku Ayahanda dan Ibunda saya atas pengorbanan mulia dan suci serta restunya demi keberhasilan penulis mencapai apa yang dicita-citakan. Semoga Allah *Subhanahu Wa ta'Ala* memberikan rahmat, berkah dan hidayah-Nya serta meninggikan derajat di sisi-Nya.

Penyelesaian skripsi ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada keterlibatan berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuannya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. Muhajir, M.Pd. dan Ibu Dra. Jumiati Nur,

M.Pd. selaku pembimbing yang selalu memberikan dorongan, semangat, dan membuka wawasan berpikir dalam memecahkan masalah dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, serta Bapak Dr. Muhajir, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Makassar, serta seluruh dosen dan para staf dalam lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar karena berkat bimbingan dan arahan kepemimpinan mereka pula penulis bisa menyelesaikan proposal ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga, sahabat, kakak-kakak, teman kelas, dan teman-teman Program Studi PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar yang tidak dapat disebut namanya satu persatu, yang telah memberikan masukan mengenai materi yang perlu ditambahkan dalam skripsi ini, motivasi dan semangat ketika penulis sedang mengalami kesulitan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Rasa syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa ta'Ala.* atas bantuan yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang dapat menyempurnakan

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis.

***Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khaerat***

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb..***

Makassar, Juli 2020

Penulis

AKBAR ABA





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERJANJIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori .....	7
1. Implementasi.....	7
2. Kepribadian Muhammadiyah.....	9
3. Pembelajaran.....	11
4. Pendidikan Kewarganegaraan.....	12
5. Landasan Teori.....	15
6. Hasil Penelitian yang Relevan .....	22
B. Kerangka Pikir .....	25
C. Batasan Penelitian.....	26
1. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.....	26
2. Implementasi Kepribadian Muhammadiyah dalam pembelajaran PKn .....	27
3. Hambatan pengimplementasian Kepribadian Muhammadiyah dalam pembelajaran PKn .....	27
4. Terbentuknya proses pembelajaran sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28

C. Informan Penelitian .....	29
D. Sumber Data.....	29
E. Instrumen Penelitian.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data .....	32

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran lokasi penelitian .....	35
B. Hasil Penelitian.....	37
1.1 Pengimplementasian Kepribadian Muhammadiyah dalam pembelajaran PKn di Unismuh Makassar.....	37
2.1. Hambatan yang Dihadapi Terkait pengimplementasian Kepribadian Muhammadiyah di lapangan pada proses pembelajaran PKn.....	44
B. Pembahasan.....	49

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>
----------------------------	-----------

#### **LAMPIRAN**

#### **DOKUMENTASI**

## DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
1.	Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir.....	26





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya manusia. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Perguruan tinggi merupakan salah satu bagian terpenting dalam dunia pendidikan yang bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada sisi lain pertumbuhan perguruan tinggi ini membuat para calon mahasiswa memiliki alternatif dalam memilih sebuah perguruan tinggi, yaitu di antaranya perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang berbasis Islam untuk melanjutkan jenjang pendidikan setelah jenjang pendidikan menengah. Para calon mahasiswa harus bisa mengambil keputusan untuk memilih jenjang pendidikan yang ingin mereka pilih dengan mempertimbangkan sebelumnya. Moerika (2008) menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan adalah proses yang melibatkan pencarian informasi, penilaian pertimbangan yang diikuti dengan proses penyesuaian diri terhadap dampak dari keputusan tersebut, dan pemahaman terhadap tujuan yang mendasari keputusan tersebut.

Pengambilan keputusan merupakan langkah nyata yang dilakukan seseorang untuk menetapkan suatu pilihan atau mempertimbangkan jenjang pendidikan di perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi swasta, maupun perguruan tinggi negeri. (Hadi Kurnianto, 2016)

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang mengembangk dakwah *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* yang bergerak di setiap lini sektor yang memiliki banyak amal usaha yang bergerak di bidang sosial, dakwah, pemberdayaan masyarakat termasuk salah satunya dalam bidang pendidikan melalui majelis pendidikan tinggi (DIKTI) pimpinan pusat Muhammadiyah yang kemudian menjadi perintis pendirian perguruan tinggi Islam di seluruh Indonesia.

Universitas Muhammadiyah Makassar atau dengan sebutan Unismuh Makassar merupakan amal usaha Muhammadiyah yang bergerak di bidang pendidikan yang didirikan pada tanggal 19 Juni 1963 sebagai cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Berdirinya perguruan tinggi ini adalah realisasi dari hasil musyawarah wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Tenggara ke-21 di Kabupaten Bantaeng. Pendirian tersebut didukung oleh persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran dakwah *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*. Universitas Muhammadiyah Makassar dinyatakan sebagai perguruan tinggi swasta terdaftar sejak 1 Oktober 1965.

Salah satu ciri yang melekat pada perguruan tinggi Muhammadiyah adalah adanya penanaman nilai-nilai ideologi Muhammadiyah dalam pembelajaran, nilai-nilai ideologi inilah diharapkan mampu mengantarkan

Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai perguruan tinggi Islam terkemuka. Upaya maksimal untuk melahirkan kader-kader Muhammadiyah melalui proses pendidikan di lembaga pendidikan Muhammadiyah termasuk juga Perguruan Tinggi Muhammadiyah harus diupayakan melalui berbagai usaha terutama pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (*Civics*) merupakan mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Sejak saat itu pula, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran, selalu ada dalam kurikulum yang berlaku dan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam dua Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional terakhir, yaitu UU No. 2 tahun 1989 dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Kewarganegaraan selalu dinyatakan sebagai program atau mata pelajaran yang harus ada pada setiap jenjang pendidikan, dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi.

Kehadiran Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) pada masa sekarang ini haruslah benar-benar dimaknai sebagai jalan yang diharapkan akan mampu mengantar mahasiswa berkepribadian yang baik. Tentunya ekspektasi ini harus disertai dengan tindakan nyata bangsa ini, khususnya kalangan Perguruan Tinggi, untuk mengapresiasi dan mengimplementasikan Pendidikan Kewarganegaraan dalam dunia pendidikan.

Untuk mencapai tujuan Pendidikan Kewarganegaraan seperti di atas, dibutuhkan model dan strategi pembelajaran yang humanistik berdasarkan pada asumsi bahwa mahasiswa adalah manusia yang mempunyai potensi dan



karakteristik yang berbeda-beda. Mahasiswa diposisikan sebagai subjek, sementara dosen diposisikan sebagai fasilitator dan mitra dialog mahasiswa. Materi disusun berdasarkan kebutuhan dasar mahasiswa, bersifat fleksibel, dinamis dan fenomenologis sehingga materi tersebut bersifat kontekstual dan relevan dengan tuntutan dan perubahan masyarakat.

Unismuh Makassar yang berbasis Al-Islam Kemuhammadiyah, mewajibkan kepada semua fakultas dan jurusan untuk mengimplementasikan nilai-nilai ideologi Muhammadiyah pada setiap proses pembelajaran pada semua mahasiswa sebagai upaya untuk membentuk kepribadian yang berkarakter dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah.

Oleh karena itu, melalui nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah inilah diharapkan sebagai salah satu wadah gerakan untuk mengedepankan nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah dalam hal memperkuat karakter mahasiswa, baik dalam hal proses pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Namun hal ini harus juga ditopang oleh tenaga pendidik yang paham akan pengamalan nilai-nilai Kemuhammadiyah pada proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengimplementasian Kepribadian Muhammadiyah pada proses pembelajaran PKn di Unismuh Makassar?

2. Apa hambatan yang dihadapi mahasiswa dan dosen terkait pengimplementasian Kepribadian Muhammadiyah pada proses pembelajaran PKn di Unismuh Makassar?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kepribadian Muhammadiyah pada proses pembelajaran PKn di Unismuh Makassar.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi mahasiswa dan dosen dalam pengimplementasian Kepribadian Muhammadiyah pada proses pembelajaran PKn di Unismuh Makassar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan nantinya hasil penelitian dapat berguna sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Diharapkan penelitian ini menjadi sumber informasi dalam menambah khasanah pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan bisa menjadi bahan acuan dan sekaligus mampu memberikan stimulus untuk peneliti lain yang tertarik untuk meneliti topik yang berkenaan dengan pembelajaran, khususnya nilai-nilai kepribadian Muhammadiyah.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan bagi masyarakat dan civitas akademik Unismuh Makassar tentang “Implementasi Kepribadian Muhammadiyah pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Makassar”.





## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Implementasi**

Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002). Kata implementasi bermuara pada pengertian suatu aktifitas yaitu adanya reaksi atau tindakan mekanisme suatu sistem, implementasi bukan suatu aktifitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Sedangkan Pengertian Impelementasi Menurut Para Ahli sebagai berikut:

##### **a. Menurut Browne dan Wildavsky**

Dalam implementasi sederhana bisa berarti eksekusi atau aplikasi.

Browne dan Wildavsky (Usman, 2004) berpendapat bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas menyesuaikan satu sama lain”.

##### **b. Menurut Syukur dan Surmayadi**

Syukur dan Surmayadi (2005: 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang sedang dilaksanakan (2) kelompok sasaran, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan untuk manfaat dari program, perubahan atau perbaikan elemen, baik untuk organisasi atau individu yang bertanggung jawab untuk memperoleh pelaksanaan dan pengawasan proses implementasi.

c. Menurut Nurdin Usman

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya berjudul Konteks Berbasis Implementasi Kurikulumnya menyatakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: "Implementasi diarahkan untuk kegiatan, tindakan, tindakan atau mekanisme sistem Implementasi tidak hanya aktivitas, tetapi kegiatan dan untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang direncanakan". (Usman, 2002: 70).

d. Menurut Hanifah Harsono

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik menyatakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut:

Implementasi adalah proses untuk melaksanakan kebijakan tersebut ke dalam tindakan kebijakan politik dalam pembangunan kebijakan administrasi dalam rangka meningkatkan program. Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem". (Harsono, 2020: 67)

Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Dalam kenyataannya, implementasi merupakan proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan.

Dalam konteks implementasi pendekatan-pendekatan yang telah dikemukakan di atas memberikan tekanan pada proses. Esensinya implementasi adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide atau gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk desain (tertulis) agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut. Masing-masing pendekatan itu mencerminkan tingkat pelaksanaan yang berbeda.

## **2. Kepribadian Muhammadiyah**

Kepribadian Muhammadiyah sebagaimana tercantum dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Selanjutnya, landasan dan sumber Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah ialah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang merupakan pengembangan dan pengayaan dari pemikiran-pemikiran formal (baku) dalam Muhammadiyah seperti Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCH), Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Khittah Muhammadiyah (Rohmasyah: 2017), serta hasil-hasil

Keputusan Majelis Tarjih.

Kemudian, kepentingan akan adanya pedoman yang dijadikan acuan bagi segenap anggota Muhammadiyah sebagai penjabaran dan bagian dari Keyakinan Hidup Islami dalam Muhammadiyah yang menjadi amanat Tanwir Jakarta 1992 yang lebih merupakan konsep filosofis dan seterusnya.

Terakhir, demi kualitas penelitian ini, fokus penelitian dikerucutkan lagi pada bagian Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah tentang Kepribadian Muhammadiyah (Haedar Nashir, 2017) dengan point-point sebagai berikut:

- a. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan.
- b. Memperbanyak kawan dan mengamalkan Ukhuwah Islamiyah.
- c. Lapang dada, luas pandangan, dengan memegang teguh ajaran Islam.
- d. Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan.
- e. Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah.
- f. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik.
- g. Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan, sesuai dengan ajaran Islam.
- h. Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya.



- i. Membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah Swt.
- j. Bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana.

### 3. Pembelajaran

Pembelajaran yang sering juga disebut dengan belajar mengajar, sebagai terjemahan dari istilah "*Instructional*" terdiri dari dua kata, belajar dan mengajar. Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Hal ini sesuai dengan pendapat Woolfolk & Nicolich (1984: 159) yang mengatakan bahwa perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuannya, kecakapan dan kemampuannya, daya reaksinya, daya penerimaannya dan lain-lain aspek yang ada pada individu (Nana Sujana, 2004 ).

Pembelajaran dikemukakan oleh Gagne (1977) yaitu pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Lebih lanjut, Gagne (1985) mengemukakan teorinya lebih lengkap dengan mengatakan bahwa pembelajaran dimaksudkan untuk menghasilkan belajar, situasi eksternal harus dirancang sedemikian rupa untuk mengaktifkan, mendukung, dan mempertahankan proses internal yang terdapat dalam setiap peristiwa belajar.

Di sisi lain pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, tetapi sebenarnya mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar agar peserta didik dapat belajar dan menguasai isi

pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga dapat memengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek psikomotorik) seorang peserta didik, namun proses pengajaran ini memberi kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan pengajar saja. Sedangkan pembelajaran menyiratkan adanya interaksi antara pengajar dengan peserta didik.

#### 4. Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut (Azra dalam ICCE, 2003) bahwa istilah Pendidikan Kewargaan pada satu sisi identik dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Namun di sisi lain, istilah Pendidikan Kewargaan secara substantif tidak saja mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang merupakan penekanan dalam istilah Pendidikan Kewarganegaraan, melainkan juga membangun kesiapan warga negara menjadi warga dunia (*Global Society*). Dengan demikian, orientasi Pendidikan Kewargaan secara substantif lebih luas cakupannya daripada Pendidikan Kewarganegaraan.

Sejalan dengan itu, (Zamroni dalam ICCE, 2003) berpendapat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Demokrasi adalah suatu *Learning Process* yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain. Kelangsungan demokrasi tergantung pada kemampuan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi. Selain itu, Pendidikan

Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki *Poltical Knowledge, Awareness, Attitude, Political Efficacy* dan *Political Participation* serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya, masyarakat, dan bangsa. Menurut Soedijarto (dalam ICCE, 2003) mengartikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta dalam membangun sistem politik yang demokratis.

Sementara itu, Pendidikan Kewarganegaraan keberadaanya secara yuridis cukup kuat, hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan telah dituangkannya Pendidikan Kewarganegaraan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ini berarti bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pembentukan *Nation and Character Building*. Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 dan No. 45/U/2002 tentang kurikulum pendidikan tinggi berbasis kompetensi (KBK), yang dipertegas lagi dengan Keputusan Dirjen Dikti No.38/Dikti/Kep/2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan

Tinggi. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menekankan kejelasan hasil didik sebagai seseorang yang kompeten dalam hal, yakni (1) menguasai pengetahuan dan keterampilan tertentu, (2) menguasai penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bentuk karya, (3) menguasai sikap berkarya, dan (4) menguasai hakikat dan kemampuan dalam berkehidupan bermasyarakat dengan pilihan karya.

Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di perguruan tinggi bertujuan membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan. Dalam konteks mata kuliah pengembangan kepribadian kompetensi yang dimaksud merupakan kemampuan dan kecakapan yang terukur setelah mahasiswa mengikuti proses pembelajaran secara keseluruhan yang meliputi kemampuan akademik, sikap dan keterampilan. Dalam pembelajarannya minimal mencapai kompetensi dasar atau yang sering disebut kompetensi minimal terdiri atas tiga jenis, yaitu pertama, kecakapan dan kemampuan penguasaan pengetahuan yang terkait dengan materi inti. Kedua, kecakapan dan kemampuan sikap. Ketiga, kecakapan dan kemampuan mengartikulasikan keterampilan seperti kemampuan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik, kemampuan melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan.

Ketiga kompetensi tersebut diartikulasi oleh mahasiswa untuk mengadakan pembelajaran (*Transfer of Learning*), pengalihan nilai (*Transfer of Value*) dan pengalihan prinsip-prinsip (*Transfer of Principles*) pendidikan agama,



pendidikan Pancasila, dan pendidikan Kewarganegaraan. Kemampuan mendapatkan kepercayaan dari rakyat, kemampuan membangun kearifan diri (*Self Wisdom*) dalam menggunakan kepercayaan yang diberikan masyarakat merupakan tuntutan dasar kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian.

## 5. Landasan Teori

Dalam penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme struktural yang pencetusnya adalah Talcott Parson. Asumsi dasar dari teori Fungsionalisme Struktural, salah satu paham atau perspektif yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya. Kemudian perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lainnya. Perkembangan fungsionalisme didasarkan atas model perkembangan sistem organisasi yang didapat dalam struktur biologis manusia, asumsi dasar teori ini ialah bahwa semua elemen harus berfungsi dan fungsional sehingga masyarakat bisa menjalankan fungsinya dengan baik.

Masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan.

Fungsi dikaitkan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada memenuhi kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem. Ada empat persyaratan mutlak yang harus ada supaya termasuk masyarakat bisa berfungsi. Keempat persyaratan itu disebut AGIL (*Adaption, Goal Attainment, Integration, dan Latency*). Demi keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yakni:

- a. Adaptasi (*Adaptation*): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu.
- b. Pencapaian tujuan (*Goal Attainment*): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
- c. Integrasi (*Integration*): sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya.
- d. Pemeliharaan pola (*Latency*): sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Sistem organisasi biologis dalam sistem tindakan berhubungan dengan fungsi adaptasi yakni menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan merumuskan tujuan dan mengerahkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan. Sistem berhubungan dengan fungsi integrasi dengan mengontrol komponen pembentukan masyarakat. Akhirnya sistem

kebudayaan berhubungan dengan fungsi pemeliharaan pola-pola atau struktur yang ada dengan menyiapkan norma-norma dan nilai yang memotivasi mereka dalam melakukan suatu tindakan.

Inti pemikiran Parsons ditemukan didalam empat sistem tindakan ciptaanya. Dengan asumsi yang dibuat Parsons dalam sistem tindakannya, berhadapan dengan masalah yang sangat diperhatikan parsons dan telah menjadi sumber utama kritikan atas pemikirannya. Problem Hobbesian tentang keteraturan yang dapat mencegah perang sosial semua lawan semua, menurut Parsons tak dapat dijawab oleh filsuf kuno. Parsons menemukan jawaban problem didalam fungsionalisme struktural dengan asumsi sebagai berikut.

- a. Sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang saling tergantung.
- b. Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan.
- c. Sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan yang teratur.
- d. Sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian-bagian lain.
- e. Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya.
- f. Alokasi dan integrasi merupakan dua proses fundamental yang diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem.
- g. Sistem cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan diri yang meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antara bagian-

bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda-beda dan mengendalikan kecenderungan untuk merubah sistem dari dalam.

Masyarakat yang terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan.

Kajian seorang sosiolog dalam melihat sesuatu, senantiasa berangkat dari bawah, berdasarkan fakta-fakta di masyarakat dengan pendekatan, selalu berdasarkan *Social Affect* (fakta di lapangan). Dengan demikian ketika akan melihat bagaimana implemementasi nilai-nilai Kemuhammadiyah dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Mahasiswa Unismuh Makassar, berdasarkan pendekatan sosiologis. Talcott Parsons, sebagai seorang sosiolog yang termasuk tokoh utama aliran fungsionalisme struktural modern, telah berjasa dalam memotret kondisi masyarakat dengan teori sistem sosial, adaptasi sosial, dan tindakan sosial. Teori sosiologi tersebut dapat digunakan untuk memotret realitas sosial, dengan memahami secara objektif atas kondisi masyarakat, kajian ini diharapkan mampu mencari solusi yang tepat dalam mengembangkan serta menjawab berbagai permasalahan dalam persoalan saat ini.



a. Sistem tindakan

Sistem tindakan merupakan sistem mengandaikan adanya kesatuan antara bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Kesatuan antara bagian itu pada umumnya mempunyai tujuan tertentu, dengan kata lain, bagian itu membentuk satu kesatuan sistem demi tercapainya tujuan atau maksud tertentu, teori Parsons mengenai tindakan meliputi empat sistem yaitu:

- 1) Sistem budaya, dalam sistem ini unit analisis yang paling dasar tentang arti atau sistem simbolik (kepercayaan religius bahasa dan nilai).
- 2) Sistem sosial, interaksi berdasarkan peran, interaksi tidak terbatas antar individu melainkan juga antara kelompok, institusi masyarakat, organisasi internasional.
- 3) Sistem kepribadian, individu yang merupakan aktor atau pelaku, manusia cenderung ingat dirinya sendiri ketimbang orang lain.
- 4) Sistem organisme, aspek biologis manusia sebagai satu sistem, kesatuan dari sistem ini yang paling mendasar manusia dalam arti biologis, dalam hal ini Parsons menyebutkan secara khusus menyebutkan sistem syaraf dan kegiatan motorik.

Berdasarkan teori-teori sosiologi *Parrons* pendidikan sebagai wujud kebudayaan, menyangkut perilaku manusia dalam berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungannya sebagai sistem sosial, harus memenuhi beberapa hal, di antaranya:

- a. Kegiatan pendidikan harus mampu menyesuaikan dengan kondisi serta situasi lingkungan pendidikan.
- b. Aktivitas pendidikan harus memperhatikan institusi dan peralatan yang diperlukan dalam rangka mobilisasi.
- c. Melakukan koordinasi dengan subsistem lain yang terkait dalam rangka mendukung terselenggaranya aktivitas.
- d. Mempersiapkan konsep pendidikan yang berorientasi pada aspek kesinambungan masyarakat berdasarkan fakta sosial.

Dari penjelasan di atas maka pendidikan dalam perspektif parsons secara sistemik harus dapat melahirkan pribadi manusia yang memiliki sistem budaya dengan kekuatan iman (kepercayaan), pengetahuan, ketaatan norma dan komitmen terhadap nilai-nilai. Sistem budaya mampu memberikan kontrol terhadap sistem sosial dalam wujud institusi, pergaulan dan komunikasi. Sistem sosialnya mampu melahirkan sikap dan kepribadian yang menarik simpatik, dibarengi dengan sistem perilaku yang terpuji, karena diwujudkan dalam pergaulan sesuai dengan norma dan nilai-nilai akhlak yang baik.

Dalam perspektif fungsionalis ini suatu masyarakat dilihat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisir yang bekerja dalam suatu cara yang agak teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat. Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang stabil dengan suatu kecenderungan ke arah keseimbangan. Sebagai para juru bicara yang terkemuka, setiap kelompok atau lembaga melaksanakan tugas tertentu dan terus-menerus karena hal itu fungsional.

Talcott Parsons menganalisis masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Inti dari suatu sistem adalah hubungan antara bagian yang membentuk satu keseluruhan yaitu berupa organisme sosial. Karena organisme sosial merupakan suatu sistem, maka bagian dari organisme sosial masyarakat tersebut berusaha untuk menetralkan gangguan atau mempertahankan keseimbangan. Parsons memperkenalkan dua konsep yang berkenaan dengan sistem sosial yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep fungsi, yang mana dimengerti sebagai sumbangan kepada keselamatan dan ketahanan sistem sosial.
- b. Konsep pemeliharaan keseimbangan, hal ini merupakan ciri utama dari tiap sistem sosial.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Parsons melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang mana tiap unsur saling mempengaruhi, saling membutuhkan, dan bersama-sama membangun totalitas yang ada serta bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan.

Teori fungsional melihat manusia dalam masyarakat sebagai suatu sistem sosial ditandai oleh dua tipe kebutuhan dan dua jenis kecenderungan bertindak. Demi kelanjutan hidupnya, manusia harus bertindak terhadap lingkungan, baik dengan cara menyesuaikan diri pada lingkungan itu sendiri atau menguasai dan mengendalikannya. Teori fungsionalisme memandang sumbangan agama terhadap masyarakat dan kebudayaan berdasarkan atas karakteristik pentingnya, yakni transendensi pengalaman sehari-harinya dalam lingkungan alam.

Teori fungsional menumbuhkan perhatian pada sumbangan fungsional agama yang diberikan terhadap sistem sosial. Agama dengan kedekatannya pada suatu yang berada di luar jangkauan dan keyakinannya bahwa manusia berkepentingan pada suatu pandangan realistik ini, kekecewaan dan frustrasi yang dibebankan oleh ketidakpastian dan ketidakmungkinan penerimaan dan penyesuaian dengannya. Apalagi dengan melibatkan norma dan peraturan masyarakat sebagai bagian dari tatanan etis supra-empiris yang lebih besar telah ditetapkan dan disucikan oleh kepercayaan dan praktik beragama, maka agama dalam hal ini telah mendorong penguatan pelaksanaannya.

Konsep Parsons dalam melihat masyarakat sebagai sistem interaksi kolektif dan tingkat perilaku, merujuk pada persekutuan hidup (*Social Community*) dan ini dinilai sebagai inti sari struktur sosial yang fungsi utamanya adalah mengintegrasikan. Fungsi integratif ini setidaknya bisa ditunjukkan dalam dua hal: 1) Memberikan kriteria dan identitas keanggotaan dalam sistem sosial, 2) Menciptakan norma sosial yang mengatur hubungan baik antar-individu maupun antar subkolektif dalam sistem sosial yang membangun integrasi kehidupan bermasyarakat.

## **6. Hasil Penelitian yang Relevan**

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang biasa digunakan untuk mencari persamaan dan perbedaan antara penelitian orang lain dengan penelitian yang sedang kita buat atau membandingkan penelitian yang satunya dengan yang lain, di sini saya akan memberikan contoh tentang penelitian yang relevan yang terkait dengan pembahasan penelitian yang saya miliki.



- a. Syamsul Yazid (UMM, 2001), dalam tesisnya yang berjudul “Implementasi Kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang”, menyimpulkan bahwa pada umumnya dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyah sudah menerapkan secara konsisten isi kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyah 2001 dalam proses pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah I, II dan III di UMM baik dari segi materi, metode dan sistem evaluasi yang digunakan. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Yazid dan penulis terletak pada tempat penelitian dan variabel kajian.
- b. Jacky Rudianto (UMS, 2010), dalam skripsinya yang berjudul “Peran Muhammadiyah dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Masyarakat (Pendekatan Sosiologis di Desa Playen Gunung Kidul)”, menyimpulkan bahwa keberadaan Muhammadiyah di Desa Playen mempunyai peranan penting terhadap pelaksanaan pendidikan Islam, yaitu untuk berdakwah *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dan mengajak masyarakat untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar berdasarkan pada sumber pokok syariat Islam melalui kegiatan dari majelis-majelis di Muhammadiyah. Muhammadiyah menjadi faktor pendidikan yang paling pokok dalam pengembangan pendidikan Islam baik formal dan non formal. Sehingga perbedaan yang didapatkan dari penelitian penulis dengan skripsi yang telah dibuat oleh Jacky Rudianto yaitu tesis ini lebih menekankan pada implementasi nilai-

nilai pendidikan Muhammadiyah dari pada peran Muhammadiyah.

Selain itu, tempat yang digunakan dalam penelitian juga berbeda.

- c. Dewa Bagus Sanjaya (IKIP Negeri Singaraja, 2006) dalam tesisnya yang berjudul “Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dan Global”, Ditinjau dari sudut yuridis, posisi dan keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan cukup kuat, sebagai mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa. Untuk memperkuat kedudukan Pendidikan Keawarganegaraan. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dewa Bagus Sanjaya dan penulis terletak pada tempat penelitian dan variabel kajian.
- d. Buyamin Maftuh (UPI, 2008), dalam tesisnya yang berjudul “Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan Nasional melalui Pendidikan Kewarganegaraan” menyimpulkan bahwa melalui Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan para siswa dapat menerima dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dengan penuh nalar dan. Adapun perbedaan penelitian yang di lakukn oleh Buyamin Maftuh dan penulis terletak pada tempat penelitian dan variable kajian.
- e. Hadi Cahyono (Unismuh Ponorogo, 2019), dalam tesisnya yang berjudul “Penanaman nilai-nilai Kemuhammadiyah berbasis wawasan kebangsaan pada mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Ponorogo ” menyimpulkan bahwa pada umumnya penanaman nilai-nilai Kemuhammadiyah berbasis wawasan kebangsaan secara garis besar mampu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari namun belum

sepenuhnya tergambar secara jelas dalam proses pembelajaran. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Buyamin Maftuh dan penulis terletak pada tempat penelitian dan variabel kajian.

## B. Kerangka Pikir

Penyelenggaraan pendidikan yang mengarahkan kepada pendidikan nilai-nilai Kemuhammadiyah merupakan program yang ditetapkan oleh majelis pendidikan tinggi pimpinan pusat Muhammadiyah yang mengharuskan kepada seluruh mahasiswa dituntut untuk memahami dan diimplementasikan dalam kehidupan baik dalam ruang lingkup kampus maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai Kemuhammadiyah dalam semua mata pelajaran baik sekolah dasar sampai perguruan tinggi berkenaan dengan hal tersebut Muhammadiyah sebagai salah satu gerakan Islam mengedepankan nilai-nilai yang diharapkan mampu memperkuat karakter seseorang dan memperkuat nilai-nilai Islam. Seperti gerakan Islam, dakwah *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, dan gerakan tajdid. Dengan melaksanakan Dakwah Islam dan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* guna terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini mampu diterapkan dengan baik apabila adanya kerjasama antara pendidik dan terdidik pada proses pembelajaran dengan baik guna pengimplementasian nilai-nilai Kemuhammadiyah khususnya pada pembelajaran PKn yang dimana diharapkan mampu mewujudkan generasi muda yang berkarakter dan berakhlak mulia.



Gambar 2.1 kerangka pikir

### C. Batasan Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam proses penelitian, berikut akan dikemukakan beberapa konsep yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji masalah-masalah Implementasi Kepribadian Muhammadiyah pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Makassar berikut ini beberapa rumusan konsep-konsep tersebut:

#### 1. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Merupakan mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. PKn adalah mata kuliah yang mengarah pada pembentukan kepribadian yang diharapkan dapat mewujudkan pribadi yang memiliki karakter yang baik.



## 2. Implementasi Kepribadian Muhammadiyah dalam pembelajaran PKn

Adalah bagaimana mengintegrasikan pembelaran PKn dengan nilai-nilai kepribadian Muhammadiyah dalam proses pembelajaran.

## 3. Hambatan pengimplementasian Kepribadian Muhammadiyah dalam pembelajaran PKn.

Hambatan ini mengarah pada pemahaman nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah yang belum mampu di implentasikan secara maksimal oleh dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran PKn.

## 4. Terbentuknya proses pembelajaran sesuai dengan Kepribadian Muhammadiyah yaitu:

- a) Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan.
- b) *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik.
- c) Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis terkait dengan objek yang diteliti demi memberi informasi dan data yang valid terkait dengan fakta dan fenomena yang ada di lapangan.

*Menurut Lexy J. Moleong* dalam penelitian kualitatif, peneliti atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data. Hal ini dikarenakan orang-orang bisa sebagai instrumen yang sangat luwes dapat menilai keadaan dan mengambil keputusan. Selain itu hanya manusia sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya dan hanya manusia yang mampu memahami kaitannya dengan kenyataan di lapangan.

##### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

###### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No 259, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

###### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan yaitu 11 Januari - 07 Februari 2020.

### **C. Informan Penelitian**

Pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan secara acak berdasarkan kriteria tertentu untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Adapun pemilihan informan dikhususkan pada FKIP Jurusan PPKn, yaitu sebagai berikut:

1. Wakil Dekan IV FKIP Unismuh Makassar (Bidang Kemuhammadiyah).
2. Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Unismuh Makassar pada Prodi PPKn 5 dosen.
3. Mahasiswa Jurusan PPKn Unismuh Makassar 10 orang.

### **D. Sumber Data**

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan yakni: Mahasiswa PPKn, dosen PPKn, dan wakil dekan IV FKIP Unismuh Makassar.
2. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui informasi tertulis, dan dokumentasi serta dari jurnal dan buku yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dibahas.

### **E. Instrumen penelitian.**

Adapun instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Lembar Observasi**

Berisi catatan-catatan yang diperoleh penelitian pada saat melakukan pengamatan langsung di lapangan. Adapun yang peneliti observasi

dalam penelitian ini adalah guru dan mahasiswa prodi PPKn Unismuh Makassar

## 2. Pedoman Wawancara

Adalah pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang terkait dengan penelitian sehingga data yang dikumpulkan bersifat valid/sahih.

## 3. Alat/bahan dokumentasi

Seperti alat perekam, kamera serta alat catatan (pulpen dan buku).

## F. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan, data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data primer (data yang diperoleh langsung dari sumbernya) dan data sekunder (data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya) dengan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### 1. Observasi.

Observasi merupakan langkah yang ditempuh oleh peneliti untuk mendapatkan gambaran konkrit mengenai Implementasi nilai-nilai Kemuhammadiyah pada pembelajaran Universitas Muhammadiyah Makassar. Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif, pengamatan yang dimanfaatkan sebesar-besarnya seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2005:174-175) yaitu:

- a. Teknik pengambilan ini didasarkan atas pengamatan secara langsung



- b. Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.
- c. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.

Observasi merupakan bagian dari teknik pengumpulan data di mana mahasiswa menjadi objek dalam penelitian dan dalam penelitian tersebut akan dicapai apa menjadi pokok permasalahan yakni mengetahui apa penyebab terjadinya degradasi fungsi pendidikan serta memahami bentuk degradasi fungsi dari pendidikan kontemporer.

## 2. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer dari para pihak yang dijadikan informan penelitian. Teknik wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu Pedoman Wawancara. Pedoman wawancara tersebut berisi pokok-pokok pertanyaan terbuka untuk diajukan kepada para informan penelitian. Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara, yaitu:

- a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Dalam hal ini perlu adanya kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan pedoman wawancara model ini sangat tergantung pada pewawancara.

- b. Pedoman pewawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *checklist*. Pewawancara hanya tinggal memberi tanda v (*check*).

Dalam pelaksanaan penelitian lapangan, wawancara biasanya dilaksanakan dalam bentuk "*semi structured*". Dimana interviewer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan lebih lanjut. Dengan model wawancara seperti ini, maka semua variabel yang ingin digali dalam penelitian akan dapat diperoleh secara lengkap dan mendalam.

### 3. Dokumentasi

Mengumpulkan bahan atau dokumen yang ada berkaitan dengan proses pembelajaran nilai-nilai Kemuhammadiyah.

## G. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

### 1. Pengumpulan data

Data dikumpulkan oleh peneliti berupa data dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi yang dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek, yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti (Miles dan Huberman). Pengamatan juga mencakup data-data lainnya baik itu data verbal maupun non verbal dari penelitian ini.

## 2. Reduksi data

Menurut Miles dan Huberman reduksi data merupakan proses pemilihan/penyederhanaan data-data yang diperoleh baik itu dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang didasarkan atas fokus permasalahan. Terdapat data yang penting dan data yang tidak digunakan setelah melalui proses pemilihan data. Kemudian data diolah dan disajikan dengan bahasa maupun tulisan yang lebih ilmiah dan lebih bermakna.

## 3. Penyajian data

Adalah proses penampilan data dari semua hasil penelitian dalam bentuk paparan naratif representatif tabular termasuk dalam format matriks, grafis dan sebagainya, yang nantinya dapat mempermudah peneliti dalam melihat gambaran hasil penelitian karena dari banyaknya data dan informasi tersebut peneliti kesulitan dalam pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian ini (Usman, 2009: 85). Data-data yang diperoleh disajikan dalam format yang lebih sederhana sehingga peneliti mudah dalam menganalisisnya dan membuat tindakan berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari penyajian data-data tersebut.

## 4. Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut **Miles dan Huberman** adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami

perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Mengapa bisa demikian? Karena seperti telah dikemukakan di atas bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran lokasi penelitian

Universitas Muhammadiyah Makassar didirikan pada tanggal 19 Juni 1963 sebagai cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pendirian perguruan tinggi ini adalah realisasi dari hasil Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Tenggara ke-21 di Kabupaten Bantaeng. Pendirian tersebut didukung oleh Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran dakwah *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, lewat surat nomor : E-6/098/1963 tertanggal 22 Jumadil Akhir 1394 H/12 Juli 1963 M. Kemudian akte pendiriannya dibuat oleh notaries R. Sinojo Wongsowidjojo berdasarkan akta notaries nomor : 71 tanggal 19 Juni 1963.

Universitas Muhammadiyah Makassar dinyatakan sebagai perguruan tinggi swasta terdaftar sejak 1 Oktober 1965. Universitas Muhammadiyah Makassar (*Unismuh Makassar*) sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) mengemban tugas dan peran yang sangat besar bagi agama, bangsa dan negara, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Selain posisinya sebagai salah satu PTM/PTS di Kawasan Timur Indonesia yang tergolong besar, juga padanya tertanam kultur pendidikan yang diwariskan sebagai amal usaha Muhammadiyah. Nama Muhammadiyah yang terintegrasi dengan nama Makassar memberikan harapan terpadunya budaya, keilmuan dan nafas keagamaan.

Pada awal berdirinya, Universitas Muhammadiyah Makassar membina dua fakultas yakni Fakultas Keguruan dan Seni Jurusan Bahasa Indonesia, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Umum (PU), dan Pendidikan Sosial (PS) yang dipimpin oleh rektor Dr. H. Sudan. Pada tahun yang sama (1963) Universitas Muhammadiyah Makassar telah berdiri sendiri dan dipimpin oleh rektor Drs. H. Abdul Watif Masri. Perkembangan berikutnya Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 1965 membuka fakultas baru yaitu: Fakultas Ilmu Agama dan Dakwah (FIAD), Fakultas Ekonomi (Fekon), Fakultas Sosial Politik, Fakultas Kesejahteraan Sosial, dan Akademi Pertanian. Selanjutnya tahun 1987 membuka Fakultas Teknik, tahun 1994 Fakultas Pertanian, tahun 2002 membuka Program Pascasarjana, dan tahun 2008 membuka Fakultas Kedokteran, dan sampai saat ini, Universitas Muhammadiyah Makassar telah memiliki 7 Fakultas 34 Program Studi dan Program Pascasarjana yang telah terakreditasi BAN-PT.

Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2003 mengalami tahapan transisi sejarah perkembangan, berupa perubahan formasi kepemimpinan dengan bergabungnya generasi muda dan generasi tua. Pimpinan dan seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar bertekad untuk memelihara hasil capaian para pendahulu dan mengembangkannya kepada capaian yang lebih baik, serta berkomitmen: (1) memelihara kepercayaan masyarakat, (2) mencapai keunggulan dalam kompetisi yang semakin ketat, dan (3) mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pengembangan diri. Dari ke

tiga komitmen tersebut diharapkan dapat mengantarkan Universitas Muhammadiyah Makassar untuk menjadi Perguruan Tinggi Islam terkemuka.

Universitas Muhammadiyah Makassar yang tergolong sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta terbesar di Kawasan Timur Indonesia, terus berbenah diri untuk memberikan kualitas akademik yang lebih baik kepada masyarakat. Letaknya yang strategis di bagian Selatan Kota Makassar menyebabkan Unismuh Makassar mudah dicapai dari berbagai arah dan sarana angkutan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai sebagai penunjang keberhasilan dari seluruh proses akademik, dan adanya usaha yang serius pencapaian visi dan misinya, serta adanya tekad yang bulat untuk mengembangkan Unismuh Makassar ke depan sebagai kampus yang bernuansa islami menyebabkan Universitas Muhammadiyah Makassar semakin banyak dilirik dan digemari oleh banyak kalangan, khususnya oleh para siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas. Ini terbukti, melonjaknya angka pendaftar di setiap tahun penerimaan mahasiswa baru.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1.1 Pengimplementasi Kepribadian Muhammadiyah dalam pembelajaran PKN di Unismuh Makassar.**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti laksanakan di Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No 259, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dimulai sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan 11 Maret 2020. Dalam penelitian ini seperti yang dijelaskan pada bagian metode

penelitian yang mencakup kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi, berikut ini peneliti akan memaparkan secara jelas.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil subjek beberapa orang diantaranya dosen Prodi. PPKn FKIP Unismuh Makassar Mahasiswa Prodi. PPKn Unismuh Makassar dan Wakil Dekan IV bidang Kemuhammadiyah FKIP Unismuh Makassar. Penentuan subjek dalam penelitian kualitatif, peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan dan selanjutnya berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari subjek. Sebelum itu peneliti dapat menetapkan informan lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap. Peneliti melakukan observasi dan wawancara pada dosen Prodi. PPKn, mahasiswa, dan wakil dekan IV bidang Kemuhammadiyah FKIP Unismuh Makassar yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.

Salah satu ciri yang melekat pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) adalah adanya penanaman nilai-nilai ideologi Muhammadiyah dalam pembelajaran, nilai-nilai ideologi yang diharapkan mampu mengantarkan Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai perguruan tinggi Islam terkemuka. Upaya maksimal untuk melahirkan kader-kader Muhammadiyah melalui proses pendidikan di lembaga pendidikan Muhammadiyah termasuk juga Perguruan Tinggi Muhammadiyah harus diupayakan melalui berbagai usaha terutama pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).



### a) Bidang Kemuhammadiyah FKIP Unismuh Makassar

Hal ini diperkuat keterangan informan SPS sebagai salah satu yang menaungi bidang Kemuhammadiyah di perguruan tinggi Unismuh Makassar:

“Melalui pemahaman Kepribadian Muhammadiyah yang wajib ada dalam proses pembelajaran di semua program studi, hal ini diharapkan mampu mengarahkan mahasiswa dalam pembentukan sikap dan nilai moral yang baik dalam kaitanya proses pembelajaran PKn sehingga karakter keagamaan yang kuat didalam jiwa mahasiswa senantiasa mampu dilaksanakan dengan baik sehingga nilai-nilai Kemuhammadiyah yang kaitanya dengan nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah mampu diwujudkan dalam hal ketertiban beribadah (Shalat, Puasa) dan akhlak yang baik yang semuanya ini tidak terlepas dari kerja-kerja kolektif kolegal antara semua lapisan baik dosen maupun lembaga Al-Islam Kemuhammadiyah di Unismuh Makassar, namun disamping itu pulalah saya percaya bahwa tidak semua dosen yang ada di fakultas ini memahami betul ideologi gerakan persyarikatan sebagai ruh organisasi maka kami pun selaku pimpinan tetap melakukan pembinaan dan manajemen penegelolaan yang baik contohnya dosen yang baru terangkat, akan segerah mengikuti *Baitul Arqam* dosen, mahasiswa yang baru masuk harus mengikuti *Darul Arqam Dasar*, melaksanakan program Gerakan Jama'ah dan Dakwah Jama'ah secara baik serta mengadakan pengajian atau kajian.” (Hasil wawancara 17 Januari 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang diutarakan oleh informan diatas yaitu mengenai pengimplementasian Kepribadian Muhammadiyah pada proses pembelajaran di semua proses pembelajaran di Perguruan Tinggi Muhammadiyah, yang harus di pahami semua elemen kampus baik dosen maupun mahasiswa bahwa diwajibkan semua mata pelajaran di Perguruan Tinggi Muhammadiyah menanamkan nilai-nilai Kemuhammadiyah khususnya Universitas Muhammadiyah Makassar, yang berada dalam naungan persyarikatan Muhammadiyah seperti yang diutarakan oleh SPS bahwa dengan adanya pemahaman nilai-nilai Kemuhammadiyah yang utuh oleh dosen dan mahasiswa maka

tentunya cita-cita Persyarikatan Muhammadiyah minimal dalam hal penguatan ruh Muhammadiyah dalam hal gerakan dakwah mampu aplikasikan baik dalam sikap maupun nilai yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari apalagi kaitanya dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang mengedepankan moralitas, tentunya sangat menunjang ketercapaian tujuan persyarikatan dalam bidang pendidikan, namun yang tentu menjadi perhatian yakni beberapa dosen yang mengajar kurang memahami nilai-nilai Kemuhammadiyah khususnya nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah yang tentunya akan berpengaruh pada pencapaian dari 3 nilai-nilai dasar Kepribadian Muhammadiyah yaitu spiritual, akhlak, dan nasionalisme, sehingga pembinaan dan pengajian baik pada dosen maupun mahasiswa senantiasa harus dimasifkan guna memberikan pemahaman tentang ideologi Muhammadiyah.

**b) Dosen Prodi. PPKn FKIP Unismuh Makassar**

Berikut keterangan informan R selaku dosen Prodi. PPKn Unismuh makassar, menyatakan:

“Menurut saya implementasi nilai-nilai Kemuhammadiyah di Perguruan Tinggi Muhammadiyah khususnya Kepribadian Muhammadiyah yang bersifat keagamaan, tentunya harus kita implementasikan dalam semua proses perkuliahan khususnya dalam semua mata kuliah pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan seperti nilai keagamaan, moral, identitas, nasionalisme, integritas, dan penguatan jati diri berdasarkan nilai-nilai pancasila, semuanya ini harus dipahami baik mahasiswa maupun dosen, meskipun saya harus menyampaikan secara nyata bahwa saya pribadi bukan beratar belakang Muhammadiyah namun nilai-nilai kewarganegaraan mampu saya elaborasikan dengan nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah secara umum seperti saling menghargai,

berpakaian yang sopan dan sesuai aturan agama". (Hasil Wawancara 23 Januari 2020).

Hal yang serupa yang disampaikan oleh AS selaku dosen Prodi.

PPKn Unismuh makassar, menyatakan:

"Berbicara mengenai implementasi Kepribadian Muhaammadiyah, saya harus sampaikan bahwa saya tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk hal tersebut, hal ini dikarenakan pemahaman saya yang minim tentang kepribadian Muhammadiyah, namun selaku dosen yang berlatar belakang Pendidikan Kewarganegaraan, saya kira nilai-nilai keribadian Muhammadiyah adalah nilai-nilai Islam yang mengajarkan sopan santun, adab dan moralitas." (Hasil Wawancara 27 Maret 2020).

Selanjutnya informan NH selaku dosen Prodi. PPKn Unismuh Makassar, menyatakan:

"Berkenaan hal tersebut saya kira implementasi nilai-nilai Kemuhammadiyah sangat penting kaitanya dengan pembelajaran PKn karena nilai-nilai moral yang ada pada pembelajaran PKn mampu dikaitkan dengan nilai-nilai Kumuhammadiyah seperti menjaga persatuan dan nilai-nilai keagamaan". (Hasil Wawancara 15 Januari 2020).

Selanjutnya informan IAM selaku dosen Prodi. PPKn Unismuh makassar, menyatakan:

"Pada proses pembelajaran tentu, biasanya dosen memiliki metode masing-masing untuk mengajar, saya sendidri mungkin agak berbeda metode dengan dosen yang lainnya yakni saya pakai metode pembelajaran mandiri yang dimana hal tersebut bertujuan supaya mahasiswa mampu berpiki secara ideal dan menjauhi sifat malas sebagaimana dalam hal penguatan nilai-nilai moral dan etika dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, mengenai implementasi nilai-nilai Kemuhammadiyah dalam proses pembelajaran saya pikir hal yang saya lakukan ini sudah bagian dari nilai-nilai Kemuhammadiyah dalam kepribadian Muhammadiyah secara umum, meskipun secara teks saya tidak hafal betul." (Hasil Wawancara 15 Januari 2020).

Jadi hal yang diutarakan oleh empat informan di atas menandakan bahwa kehadiran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada masa

sekarang ini harus benar-benar dimaknai sebagai jalan yang diharapkan akan mampu mengantarkan mahasiswa memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah antara lain akhlak, moralitas dan senantiasa mengedepankan persaudaraan. Tentunya hal ini harus disertai dengan tindakan seperti penanaman nilai Islam yang baik dalam proses pembelajaran PKN yang dimana sesuai yang di sampaikan informan R yakni mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai integritas, etika, moral, identitas nasional, dan penguatan jati diri berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai bentuk pengimplementasian nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah, tentunya hal tersebut menjadi salah satu dari tujuan gerakan dakwah Muhammadiyah dalam rana pendidikan dan keagamaan, disamping itu, meskipun nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah ini belum mampu di implementasikan secara menyeluruh baik dosen maupun mahasiswa seperti yang di utarakan informan IAM yaitu dalam ranah pengaplikasian nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah belum mampu di laksanakan secara maksimal, namun hal inilah yang menjadi tugas kita bersama dalam hal belajar dan terus belajar.

**c) Mahasiswa Prodi. PPKn FKIP Unismuh Makassar**

Berikut keterangan yang disampaikan Z selaku mahasiswa Prodi PPKn angkatan 2018, menyatakan:

“Berkenaan hal tersebut saya kira baru sebahagian dosen mampu menanamkan nilai-nilai Kemuhammadiyah dalam proses pembelajaran PKN sebagaimana ketika proses perkuliahan dimulai sebahagian dosen



sudah mampu menerapkan nilai-nilai Kemuhammadiyah dengan baik terkhususnya nilai-nilai keislaman contohnya membuka dengan salam dan nilai-nilai akhlak yang baik namun dilain hal adzan shalat dhuhur berkumandang masih ada sebahagian dosen yang masih melanjutkan proses perkuliahan hal ini mungkin yang perlu diperhatikan selaku kampus yang berlabel Islam.” (Hasil Wawancara 21 Januari 2020).

Selanjutnya hal disampaikan informan AA selaku mahasiswa Prodi PPKn Angkatan 2019, menyatakan:

“Kalau kita sinkronisasikan antara pembelajaran PKn dan nilai-nilai Kemuhammadiyah hal ini sangat terikat karena tolak ukur dari pembelajaran PKn yakni etika/moral begitupun nilai-nilai Kemuhammadiyah yang saya ketahui melalui *Darul Arqam Dasar* hal ini sangat sinkron dengan pembelajaran PKn karena nilai-nilai Kemuhammadiyah jagan lebih menekankan kepada moral, etika, dan tentunya spirutul seperti shalat olehnya itu sinkronisasi antara mata pelajaran PKn dan nilai-nilai Kemuhammadiyah sangat berkaitan erat sebagai wujud nyata dalam lingkup proses pembelajaran ketika Adzan berkumandang kita di harapkan oleh dosen berhenti sejenak maka saya rasa hal inilah yang menjadi sala-satu tolak ukur bahwa nilai-nilai Kemuhammadiyah dan mata kuliah PKn sangat sinkron.” (Hasil Wawancara 11 Januari 2020)

Selanjutnya informan T selaku mahasiswa Prodi. PPKn angkatan 2017, menyatakan:

“Menurut saya sesuai pertanyaan saudara, sesuai pengamatan saya belum sepenuhnya dosen PKn mampu mengimplementasikan nilai-nilai Kemuhammadiyah dalam proses pembelajaran PKn hal ini mampu saya lihat ketika dosen masuk dan kemudian membuka mata kuliah masih ada dosen yang langsung membuka secara umum tanpa memberika salam yang dimana saya kira hal tersebut juga idak mencerminkan perbuatan yang baik.” (Hasil Wawancara 21 Januari 2020).

Dari hasil wawancara 3 informan di atas, peneliti menemukan bahwa Unismuh Makassar yang berbasis Al-Islam Kemuhammadiyah, mewajibkan kepada semua fakultas dan jurusan untuk mengimplementasikan nilai-nilai ideologi Muhammadiyah khususnya nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah pada setiap proses pembelajaran

pada semua dosen dan mahasiswa sebagai upaya untuk membentuk kepribadian yang berkarakter dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah seperti nilai-nilai keagamaan dan kemasyarakatan, gerakan *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* serta sifat kerjasama, namun sesuai yang di sampaikan DAB yakni dalam rana pengaplikasian nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah saya kira dalam rana keagamaan belum mampu di laksanakan secara maksimal salah satu contohnya masih ada sebagian dosen ketika adzan sudah berkumandang di masjid kampus proses pembelajaran masih di laksanakan, tentunya hal ini menjadi perhatian besar kita selaku mahasiswa Islam.

## **1.2 Hambatan yang dihadapi terkait pengimplementasian Kepribadian Muhammadiyah di lapangan pada proses pembelajaran PKN di Unismuh Makassar.**

### **a) Bidang Kemuhammadiyah FKIP Unismuh Makassar**

Berikut keterangan dari SPS sebagai salah satu yang menaungi bidang Kemuhahammadiyah di perguruan tinggi Unismuh Makassar:

“Berbicara mengenai hambatan dosen dan mahasiswa dalam hal penanaman nilai-nilai Kemuhammadiyah dalam proses pembelajaran PKN, sebagian besar ada pada latar belakangnya, yakni sebagian dosen dan mahasiswa bukan berasal dari kader Muhammadiyah sehingga internalisasi nilai-nilai Kepribadian Kemuhammadiyah (Bersifat Keagamaan, Kemasyarakatan, *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*, dan nasionalisme), belum mampu di amalkan sesuai tujuan dasar Muhammadiyah karena salah satu kendalanya utamanya ada pada latar belakang dosen yang Prodi PPKn yang bukan berasal dari Muhammadiyah sehingga nilai-nilai ideologi seperti kemampuan dosen memahami tujuan Muhammadiyah sehingga pengimplementasian pada saat proses

pembelajaran masih susah karena dosen saja belum paham. Olehnya itu untuk mewujudkan hal tersebut di bentuklah lembaga Pengawal pelaksanaan AL Islam Kemuhammadiyah di perguruan tinggi Unismuh Makassar sebagai lembaga yang mengawal sejauh mana implementasi nilai-nilai Kemuhammadiyah di perguruan tinggi.”

Menurut beliau sebetulnya yang menjadi hambatan implementasi nilai-nilai Kemuhammadiyah di perguruan tinggi sesuai nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah ada pada kemampuan dosen dan mahasiswa yang belum mampu memahami nilai-nilai Kemuhammadiyah secara utuh dan berlanjut sehingga kendalanya ada pada diri dosen yang belum memahami tujuan Muhammadiyah. Olehnya itu salah satu gerakan yang di buat universitas yakni GJDJ (Gerakan Jama'ah dan Dakwah Jama'ah) sebagai wadah yang mampu mewadahi mahasiswa dalam hal pemahaman akan gerakan Persyarikatan Muhammadiyah di samping *Darul Arqam Dasar* bagi semua mahasiswa serta *Baitul Arqam* bagi dosen-dosen yang ingin mengabdikan di kampus Muhammadiyah secara legal.

#### **b) Dosen Prodi. PPKn FKIP Unismuh Makassar**

Berikut keterangan dari R sebagai salah satu dosen PKN FKIP Unismuh Makassar:

“Berkenaan hal tersebut saya kira implementasi nilai-nilai Kemuhammadiyah belum bisa kita yakini secara umum penerapannya dalam proses pembelajaran hal ini pun saya rasakan sebagai dosen bahwa saya bukan berlatar belakan Muhammadiyah namun saya berlatar belakan organisasi lain namun hal ini tidak menjadi beban dalam hal usaha saya mengamalkan nilai-nilai Kemuhammadiyah dalam proses pembelajaran meskipun masih tahap yang sederhana seperti dalam hal penghargaan terhadap nilai-nilai nasionalisme yang dimana hal ini juga berusaha di amalkan oleh persyarikatan Muhammadiyah”. (Hasil Wawancara 25 Januari 2020).

Selanjutnya informan AS selaku dosen Prodi PPKn menyatakan:

“Berkenaan hal tersebut saya kira implementasi nilai-nilai Kemuhammadiyah belum bias kita yakini secara umum penerapannya dalam proses pembelajaran hal ini pun saya rasakan sebagai dosen bahwa saya bukan berlatar belakang Muhammadiyah namun yang saya tahu yakni hanya secara umum bahwa nilai-nilai ini adalah sama halnya dengan nilai-nilai-nilai Islam secara umum yang mengajarkan tentang kebaikan”. (Hasil Wawancara 27 Maret 2020).

Dari hasil wawancara tiga informan diatas peneliti menemukan bahwa nilai-nilai Kepribadian Kemuhammadiyah pada proses pembelajaran PKn belum mampu di aplikasikan secara utuh khususnya dalam proses pembelajaran hal ini di karenakan adanya dosen yang bukan dari latar belakang organisasi Muhammadiyah, yang dimana hal inilah salah satu alasan mendasar ketika nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah seperti nilai-nilai gerakan keagamaan, akhlak dan nilai nasionalisme belum mampu di implementasikan , sebagaimana yang di sampaikan R bahwa beliau jujur bukan berlatar belakang Muhammadiyah sehingga mengaplikasikan gerakan Keagamaan Muhammadiyah secara teks belum mampu di aplikasikan secara utuh dalam proses pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

#### **c) Mahasiswa Prodi. PPKn FKIP Unismuh Makassar**

Berikut keterangan yang disampaikan oleh informan NMA selaku

Mahasiswa Prodi PPKn Angkatan 2017, menyatakan:

“Saya berpikir bahwa hambatan penanaman nilai-nilai Kemuhammadiyah yakni sebahagian dosen ketika mengajar hanya fokus pada mata kuliah yang di ajarkan saja sehingga kewajiban menanamkan nilai-nilai Kemuhammadiyah khususnya nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah terabaikan hal inipunlah dikrenakan atas dasar ingin menghabiskan materi



sehingga implementasi nilai-nilai Kemuhammadiyah kurang nampak.” (Hasil Wawancara 13 Januari 2020).

Selanjutnya hal yang serupa disampaikan oleh informan NA selaku Mahasiswa Prodi PPKn Angkatan 2015, menyatakan:

“Berkenaan hal tersebut saya menyakini betul bahwa tidak semua dosen mampu menanamkan nilai-nilai Kemuhammadiyah pada pembelajaran PKn karena hal ini dibenturkan oleh tujuan pembelajaran yang kurang sinkron dengan nilai-nilai Kemuhammadiyah sehingga menanamkan nilai-nilai Kemuhammadiyah agak susah seperti mata kuliah hukum”. (Hasil Wawancara 21 Januari 2020).

Selanjutnya informan T selaku Mahasiswa Prodi. PPKn Angkatan 2018, menyatakan:

“Menurut saya sesuai pertanyaan saudara, sesuai pengamatan saya belum sepenuhnya dosen PKn mampu mengimplementasikan nilai-nilai Kemuhammadiyah dalam proses pembelajaran PKn hal ini mampu saya lihat ketika dosen masuk dan kemudian membuka mata kuliah masih ada dosen yang langsung membuka secara umum tanpa memberika salam yang dimana saya kira hal tersebut juga tidak mencerminkan perbuatan yang baik”. (Hasil Wawancara 21 Januari 2020).

Dari hasil wawancara 3 informan di atas peneliti menyimpulkan bahwa nilai-nilai Kemuhammadiyah pada proses pembelajaran PKn tentunya wajib diimplementasikan dalam proses pembelajaran karena kita dinaungi oleh organisasi Muhammadiyah di lain sisi nilai-nilai yang terkandung dalam Kepribadian Muhammadiyah adalah nilai-nilai yang sangat sinkron dengan nilai etika dan moral sebagai salah satu tujuan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini disampaikan pula oleh salah satu informan T dan sejalan dengan informasi dari NA bahwa kita perlu memahami ada beberapa mata kuliah PKn yang kurang sinkron dengan

nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah sehingga menjadi hambatan dalam mengimplementasikan nilai-nilai kepribadian Muhammadiyah seperti nilai keagamaan, akhlak, dan nasionalisme kurang bisa diaplikasikan dalam proses pembelajaran.

## 2. **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, pada sub pembahasan ini peneliti akan menguraikan dua hal pokok yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu pengimplementasian nilai-nilai Kemuhammadiyah dalam pembelajaran PKn di Universitas Muhammadiyah Makassar dan hambatan yang dihadapi terkait pengimplementasian nilai-nilai Kemuhammadiyah di lapangan pada proses pembelajaran PKn. Kedua hal pokok tersebut diuraikan sebagai berikut:

### 1. **Pengimplementasian Kepribadian Muhammadiyah dalam pembelajaran PKn pada mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar**

Salah satu ciri yang melekat pada perguruan tinggi Muhammadiyah adalah keikutsertaannya dalam lembaga dakwah. Oleh karena itu, upaya untuk melahirkan, memperbanyak, dan meningkatkan kualitas kader-kader Muhammadiyah harus dilakukan secara berlanjut. Salah satu usaha yang sangat efektif untuk itu adalah amal usaha dalam bidang pendidikan, tidak terkecuali pendidikan tinggi. Sesuai dengan hal itu, upaya maksimal untuk melahirkan kader-kader Muhammadiyah melalui proses pendidikan di lembaga pendidikan Muhammadiyah termasuk juga Perguruan Tinggi Muhammadiyah harus

diupayakan melalui berbagai usaha terutama melalui pendidikan dan pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah.

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang mengembangkan dakwah *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* yang bergerak di setiap sektor yang memiliki banyak amal usaha yang bergerak di bidang sosial, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat seperti dalam bidang pendidikan melalui majelis pendidikan tinggi (DIKTI) pimpinan pusat Muhammadiyah yang kemudian menjadi perintis pendirian perguruan tinggi Islam di seluruh Indonesia.

Unismuh Makassar yang berbasis Al-Islam Kemuhammadiyah, mewajibkan kepada semua fakultas dan jurusan untuk mengimplementasikan nilai-nilai ideologi Muhammadiyah pada setiap proses pembelajaran pada semua mahasiswa sebagai upaya untuk membentuk kepribadian yang berakarakter dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah seperti: (1) beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan, (2) memperbanyak kawan dan mengamalkan Ukhuwah Islamiyah, (3) lapang dada, luas pandangan, dengan memegang teguh ajaran Islam, (4) bersifat keagamaan dan kemasyarakatan, (5) mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah, (6) *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik, (7) aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan, sesuai dengan ajaran Islam, (8) kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya (9) membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara

dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT, (10) bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Dari ke tiga nilai-nilai inilah diharapkan dapat mengantar Universitas Muhammadiyah Makassar untuk menjadi Perguruan Tinggi Islam terkemuka.

Universitas Muhammadiyah Makassar atau dengan sebutan Unismuh Makassar merupakan amal usaha Muhammadiyah yang bergerak di bidang pendidikan yang didirikan pada tanggal 19 Juni 1963 sebagai cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Berdirinya perguruan tinggi ini adalah realisasi dari hasil musyawarah wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Tenggara ke-21 di Kabupaten Bantaeng. Berdirinya perguruan tinggi tersebut didukung oleh persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran dakwah *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Universitas Muhammadiyah Makassar dinyatakan sebagai perguruan tinggi swasta terdaftar sejak 1 Oktober 1965.

Maka dapat dipahami bahwa perguruan tinggi Muhammadiyah adalah perguruan tinggi yang mengedepankan penanaman nilai-nilai ideologi Muhammadiyah dalam pembelajaran seperti: (1) bersifat keagamaan dan kemasyarakatan, (2) *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik, (3) membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Dari nilai-nilai ideologi inilah yang diharapkan mampu melahirkan kader-kader Muhammadiyah generasi masa depan yang berakhlak mulia dan cerdas, melalui proses pendidikan inipun



diharapkan Muhammadiyah menjadi faktor pendidikan yang paling pokok dalam pengembangan pendidikan Islam baik formal maupun non formal, termasuk juga Perguruan Tinggi Muhammadiyah harus diupayakan melalui berbagai usaha terutama pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Olehnya itu implementasi nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah sebagai salah satu landasan perjuangan Muhammadiyah, harus mampu disinkronkan di semua sekolah-perguruan tinggi Muhammadiyah seperti seperti: (1) nilai-nilai keagamaan dan kemasyarakatan, (2) *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik, (3) membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Namun sesuai pengamatan di lapangan, nilai-nilai tersebut belum mampu diimplementasikan secara utuh oleh sebagian dosen maupun mahasiswa, sehingga hal inilah yang menjadi cikal bakal perjuangan kita ke depan dalam ranah pembinaan, yang dimana, tentu penanaman nilai-nilai ideologi Kemuhammadiyah inilah harus kita perkuat dalam jati diri baik dosen maupun mahasiswa.

Terkait pendapat informan SPS yang menyebut dosen dan mahasiswa belum mampu memahami nilai-nilai ideologi Muhammadiyah dengan baik salah satunya karena latar belakang yang bukan berasal dari warga Muhammadiyah, maka dapat dipahami bahwa apa yang dikatakan informan ada benarnya juga

mengingat Unismuh Makassar menerima dosen dan mahasiswa bukan hanya yang berlatar belakang Muhammadiyah saja namun umum, sehingga pengimplementasian nilai-nilai ideologi ini juga belum mampu diimplementasikan dengan baik dalam proses pembelajaran PKn yang dimana apabila kita kaitkan antara keduanya, hal ini sangat berkaitan seperti, menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang apabila kita kaitkan dengan nilai-nilai kepribadian Muhammadiyah hal ini sudah masuk pada point ke 9 (Membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT).

Jadi dengan melihat kondisi ini tentunya hal yang paling mendasar harus kita lakukan dalam penanaman nilai-nilai Kemuhammadiyah dalam proses pembelajaran yakni PKn yakni perbaikan dalam segi pembinaan baik dalam hal melakukan perbaikan dari segi perekrutan dan pembinaan dosen melalui *Baitul Arqam* dosen yang memang betul-betul harus kita perketat dan pahami dengan baik nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah secara maksimal sesuai nilai-nilai Ideologi Muhammadiyah.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas, peneliti berpendapat bahwa penanaman nilai-nilai ideologi Muhammadiyah dalam pembelajaran PKn tentunya tidak akan terealisasi dengan baik dan maksimal tanpa adanya kerjasama yang baik antara semua pihak pemangku kebijakan di kampus, khususnya dalam proses perekrutan dan pembinaan dosen dan mahasiswa yang saya anggap masih tergolong kurang maksimal disamping itupun kebijakan-kebijakan yang dibuat

oleh pemangku kebijakan kampus masih bersifat simbolik belaka yang dimana hal ini saya maknai bahwa masih adanya aturan-aturan pembinaan baik dosen maupun mahasiswa yang masih kurang maksimal seperti *Baitu Arqam, Darul Arqam Dasar* yang saya rasa masih perlu dievaluasi kedepan khususnya dalam pembinaanya, sehingga keinginan kita dosen dan mahasiswa mampu memahami nilai-nilai ideologi ini dengan baik dan nantinya hal ini mampu terintegrasi dalam proses pembelajaran khususnya juga pada proses pembelajaran PKn yang dimana nilai nasionalisme dan pemahaman akan wawasan kebangsaan mampu terintegrasi dengan baik dengan nilai-nilai ideologi Muhammadiyah khususnya nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah contohnya pemahaman mahasiswa tentang sikap adil apabila kita mengacu pada nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah nilai-nilai ini sangat erat kaitanya dengan point sembilan bahwa kita dituntut bekerjasama antara semua golongan guna memelihara dan membangun negara yang adil dan makmur. Olehnya itu perlu dipahami secara baik ukuran dari kesesuaian ketercapainya nilai-nilai ideologi Muhammadiyah dan proses pembelajaran PKn tidak hanya diukur dari segi tekstualnya saja namun secara kontekstualnya juga perlu kita cermati dengan baik sehingga, tentu pemahaman akan nilai-nilai ideologi Muhammadiyah ini memang harus ada dan dipahami oleh dosen dan mahasiswa sehingga dalam proses pembelajaran nantinya dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

2. **Hambatan yang dihadapi terkait pengimplementasian Kepribadian Muhammadiyah di lapangan pada proses pembelajaran PKn di Unismuh Makassar.**

Salah satu ciri yang melekat pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah adanya penanaman nilai-nilai ideologi Muhammadiyah dalam pembelajaran. nilai-nilai ideologi inilah, khususnya nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah, yang diharapkan mampu mengantarkan Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai perguruan tinggi Islam terkemuka. Upaya maksimal untuk melahirkan kader-kader Muhammadiyah melalui proses pendidikan di lembaga pendidikan Muhammadiyah termasuk juga Perguruan Tinggi Muhammadiyah harus diupayakan melalui berbagai usaha terutama pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Untuk mencapai tujuan Pendidikan Kewarganegaraan seperti di atas, sangat dibutuhkan model dan strategi pembelajaran yang humanistik yang berdasarkan asumsi bahwa mahasiswa adalah manusia yang mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Mahasiswa diposisikan sebagai subjek, sementara dosen diposisikan sebagai fasilitator dan mitra dialog mahasiswa. Materi yang disusun berdasarkan kebutuhan dasar mahasiswa yaitu bersifat fleksibel, dinamis dan fenomenologis sehingga materi tersebut bersifat kontekstual dan relevan dengan tuntutan dan perubahan masyarakat. Namun, selaku perguruan tinggi yang dinaungi oleh organisasi Muhammadiyah, nilai-nilai Muhammadiyah khususnya nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah juga wajib diamalkan dalam semua proses pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Makassar, khususnya pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Berdasarkan pendapat informan AS sebagai salah satu dosen prodi PPKn Unismuh Makassar, peneliti dapat memahami bahwa tidak semua dosen yang



mengajar di Unismuh, memiliki pemahaman yang utuh tentang nilai-nilai ideologi Muhammadiyah, hal ini di karenakan latar belakang dan kurangnya pembinaan yang masif baik pengajian-pengajian secara formal maupun non formal, sehingga tidak jarang kita temukan dilapangan materi perkuliha dan nilai-nilai ideologi Muhammadiyah tidak mampu disejalangkan dengan baik oleh dosen dalam proses perkuliahan khususnya juga pada proses pembelajaran PKn, yang dimana wawasan kebangsaan dan nilai-nilai nasional dituntun agar di elaborasikan dengan nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah.

Di samping itu, berdasarkan hasil kajian dan analisis data yang dilakukan peneliti terhadap hambatan yang dihadapi terkait pengimplementasian nilai-nilai Kemuhammadiyah di lapangan, sebagian dosen belum sepenuhnya mampu memahami apa itu nilai-nilai Kemuhammadiyah secara teks khususnya nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah yang menjadi objek kajian peneliti, sehingga memahami dan memahamkan kepada mahasiswa masih minim baik secar formal maupun non formal, disamping itu beberapa dosen biasanya masih monoton dan hanya fokus pada materi mata kuliah yang diajarkan saja, sehigga lupa akan esensi dan transformasi dari pendidikan nilai-nilai Kemuhammadiyah yang harus juga dikaitan pada proses pembelajaran sehingga mahasiswa mampun memahami pembelajaran dari banyak sisi guna mewujudkan manusia yang berakhlak mulia, disamping itu hal utama juga yang menjadi hambatan sebahagian dosen yakni kurangnya pemahaman keagamaan tentang nilai-nilai ideologi Muhammadiyah, dan latar belakang organisasi yang bukan dari organisasi Muhammadiyah

tentunya memiliki pengaruh besar dalam pengimplementasian nilai-nilai Kemuhammadiyah oleh dosen pada proses pembelajaran PKn.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan mengenai implementasi nilai-nilai Kemuhammadiyah dalam proses pembelajaran PKn pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar dan hambatan yang dihadapi terkait pengimplementasian Nilai-nilai Kemuhammadiyah di lapangan pada proses pembelajaran PKn. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Salah satu ciri yang melekat pada perguruan tinggi Muhammadiyah adalah adanya penanaman nilai-nilai ideologi Muhammadiyah khususnya nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah ((1) bersifat keagamaan dan kemasyarakatan, (2) *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik, (3) membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT.) dalam pembelajaran, nilai-nilai inilah diharapkan mampu mengantarkan Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai perguruan tinggi Islam terkemuka. Upaya maksimal untuk melahirkan kader-kader Muhammadiyah melalui proses pendidikan di lembaga pendidikan Muhammadiyah termasuk juga Perguruan Tinggi Muhammadiyah harus diupayakan melalui berbagai usaha terutama pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Disamping itu, jelas bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar adalah perguruan tinggi Islami yang dipayungi oleh Muhammadiyah yang dimana pengimplementasian nilai-nilai Kemuhammadiyah haruslah menjadi prioritas utama dan mampu diimplementasikan dalam ruang lingkup semua proses pembelajaran khususnya pada Prodi PPKn yang menaungi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini harus mampu disinkronkan antara nilai-nilai Kemuhammadiyah dan nilai Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Hambatan yang dihadapi mahasiswa dan dosen dalam pengimplementasian Kepribadian Muhammadiyah dalam proses pembelajaran PKN khususnya Kepribadian Muhammadiyah adalah kurangnya pengetahuan akan nilai-nilai Kemuhammadiyah, serta latar belakang pengalaman yang rata-rata bukan berasal dari pesyarikatan Muhammadiyah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan mengenai pengimplementasi Kepribadian Muhammadiyah dalam pembelajaran PKN di Unismuh Makassar dan hambatan yang dihadapi terkait pengimplementasian Kepribadian Muhammadiyah di lapangan pada proses pembelajarn PKN di atas, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

- 2.1.1.1 Kehadiran Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) pada masa sekarang ini haruslah benar-benar dimaknai sebagai jalan yang diharapkan akan mampu mengantarkan mahasiswa berkepribadian yang baik. Tentunya



ekspektasi ini harus disertai dengan tindakan nyata bangsa ini, khususnya kalangan Perguruan Tinggi, untuk mengapresiasi dan mengimplementasikan Pendidikan Kewarganegaraan dalam dunia pendidikan melalui nilai-nilai Keperibadian Muhammadiyah.

2.1.1.2 Menurut penulis ada tiga persoalan yang hingga saat ini dialami oleh dosen dan mahasiswa dalam hal kendala mendasar dalam mengamalkan nilai-nilai Kemuhammadiyah dalam proses pembelajaran PKn antara lain: *pertama* orang dalam hal ini menjadi faktor yang sangat mendasar dalam pengimplementasian nilai-nilai Kemuhammadiyah ada pada individunya, ketika individu sendiri bukan dari latar belakang Muhammadiyah maka hal inilah yang menjadi kendala utama nilai-nilai Kemuhammadiyah belum bisa di amalkan dengan baik sesuai tujuan Muhammadiyah dalam mendirikan perguruan tinggi, *dua* substansi/isi hal ini di artikan bahwa faktor utama penanaman nilai-nilai Kemuhammadiyah bagi dosen dan mahasiswa yakni ada pada ilmu dan pemahaman tentang nilai-nilai Kemuhammadiyah yang harus dipahami, *ketiga* lingkungan hal ini sangat berperang penting khususnya dalam hal pengembangan pemahaman Kemuhammadiyah dalam berperilaku sosial di Masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA.

### A. Buku

- Abdurrahman, Asymuni dkk. 2012. *Pedoman Hidup Islam Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Ananda, Azwar. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) Pendidikan Karakter Bangsa Dan Strategi Pembelajaran Nilai*. Padang: UNP Press Padang.
- ICCE. 2003. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Kamal, M. 1998, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*. Yogyakarta: Persatuan
- Kurnianto, Hadi. 2016. *Pengambilan Keputusan Mahasiswa Non Muslim Untuk Studi Di Perguruan Tinggi Islam*. Jurnal tidak diterbitkan. Semarang : Universitas Muhammadiyah Semarang
- Lexy Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nashir, Haedar. 2014. *Memahami Ideologi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nashir, Haedar. 2014. *Memahami Ideologi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nasution, Harun. 1975. *Pembaharuan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Moeliono, Anton (penyunting). 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, 2009, *Himpunan Putusan Tarjih*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Poerwadarminto, W.J.S.. 2003. *Ensiklopedi Umum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahim, Husni. 2001. *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Sutopo, HB. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara

**B. Jurnal**

Nashir, Haedar. 2016. *Muhammadiyah Gerakan Modernis Modernisme Islam*. Jurnal Tajdida Vol. 14, no. 1.

Nashir, Haedar, *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), Jurnal Tajdid. hal. 420-421.

Saswand, Tri. *Analisis penerapan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah dalam perkuliahan*. Jurnal Pendidikan Indonesia. Volume 5 Nomor 1, April 2019, Hlm 27-34.

Syamsul Hidayat, dkk., *Studi KeMuhammadiyah: Kajian Historis, Ideologis dan Organisatoris*, (Surakarta: LPID UMS, 2012), hlm. 175.

Tamim, Daris *Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), Jurnal Tajdid. hlm. 30-43.



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
Jl. Sultan Alauddin Tlp. (0411) 860132 Makassar 90221

**DAFTAR INFORMAN**

NO	NAMA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN
1.	Syamsuriadi P Salenda	S2	WD IV FKIP Unismuh Makassar
2.	Nasrun Hasan	S2	Dosen Prodi PPKn Unismuh Makassar
3.	Rahim	S3	Dosen Prodi PPKn Unismuh Makassar
4.	Andi Sugiati	S3	Dosen Prodi PPKn Unismuh Makassar
5.	Indah Ainun Mutiara	S2	Dosen Prodi PPKn Unismuh Makassar
6.	Nur Auliah	-	Mahasiswa PPKn
7.	Takdir	-	Mahasiswa PPKn
8.	Nurul Mawaddah Aulia	-	Mahasiswa PPKn
9.	Sitti Hartina Amin	-	Mahasiswa PPKn
10.	Lisamajid	-	Mahasiswa PPKn
11.	Abdul Afif	-	Mahasiswa PPKn
12.	Tyo	-	Mahasiswa PPKn
13.	Juwita Buba	-	Mahasiswa PPKn
14.	Nurisrayani	-	Mahasiswa PPKn
15.	Zainuddiin	-	Mahasiswa PPKn

Makassar 2020



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
Jl. Sultan Alauddin Tlp. (0411) 860132 Makassar 90221  
**PEDOMAN WAWANCARA/INFORMAN KUNCI**

Daftar wawancara ini berfungsi sebagai pedoman untuk mempermudah mengumpulkan data tentang Implementasi Nilai-nilai Kemuhammadiyah dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Pertanyaan untuk Wakil dekan IV (Bidang Kemuhammadiyah) FKIP Unismuh Makassar adapun pertanyaanya sebagai berikut:

1. Apa yang harus diaplikasikan mahasiswa dalam hal penanaman Nilai-nilai Kemuhammadiyah dalam proses perkuliahan?
2. Apakah semua Nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah harus dipahami oleh dosen dan mahasiswa secara internal?
3. Apa perbedaan nilai-nilai Kemuhammadiyah dan Nilai-nilai Islam secara umum?
4. Apa yang menjadi kelemahan Nilai-nilai Kepribadian Kemuhammadiyah pada proses Pembelajaran susah di aplikasikan oleh dosen dan mahasiswa?
5. Apakah bentuk pengimplementasian nilai-nilai Kepribadian Kemuhammadiyah dalam proses perkuliahan?
6. Apa tujuan pengimplementasian nilai-nilai Kemuhammadiyah khususnya Kepribadian Muhammadiyah dalam proses perkuliahan?

7. Bagaimana pandangan ayahanda jika dalam proses pembelajaran, ada dosen yang mengajar bukan berlatar belakang Muhammadiyah?
8. Menurut anda paham Kemuhammadiyah seperti apa yang harus ada dalam diri mahasiswa di jurusan PPKn?
9. Bagaiman konsep perekrutan dosen jika ingin menjadi dosen di Unismuh Makassar?
10. Apa yang menjadi harapan anda kedepan tentang penanaman nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah dalam proses pembelajaran khususnya dalam kaitanya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?

Makassar 2020

AKBAR ABA





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
Jl. Sultan Alauddin Tlp. (0411) 860132 Makassar 90221  
**PEDOMAN WAWANCARA/INFORMAN KUNCI**

Daftar wawancara ini berfungsi sebagai pedoman untuk mempermudah mengumpulkan data tentang Implementasi Nilai-nilai Kemuhammadiyah dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Pertanyaan untuk dosen Prodi PPKn FKIP Unismuh Makassar adapun pertanyaanya sebagai berikut:

1. Apa yang anda ketahui tentang Persyarikatan Muhammadiyah?
2. Apakah yang anda ketahui tentang nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah yang harus di amalkan dalam proses pembelajaran pada saat perkuliahan?
3. Bagaimana pandangan anda tetang niai-nilai Kepribadian Muhammadiyah baik dalam hal keagamaan, akhlak, dan nilai-nilai nasionalisme yang dimana hal ini perlu di implementasikan dalam proses pembelajaran?
4. Apa kendala anda memahami nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah pada proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?
5. Apakah wujud dari pengimplementasian nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?
6. Mengapa memilih mengajar di Unismuh Makassar?



7. Bagaimana cara memahamkan kepada mahasiswa tentang pentingnya mempelajari nilai-nilai Keislaman dan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?
8. Menurut anda paham Kemuhammadiyah seperti apa yang harus ada dalam diri mahasiswa di jurusan PPKn?
9. Kendala apa yang anda alami selama mengajar di Unismuh Makassar yang dimana nilai-nilai Islam Kemuhammadiyah harus ada dalam setiap proses pembelajaran?
10. Apa yang menjadi harapan anda kedepan tentang penanaman nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?

Makassar 2020

AKBAR ABA



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
Jl. Sultan Alauddin Tlp. (0411) 860132 Makassar 90221  
**PEDOMAN WAWANCARA/INFORMAN KUNCI**

Daftar wawancara ini berfungsi sebagai pedoman untuk mempermudah mengumpulkan data tentang Implementasi Nilai-nilai Kemuhammadiyah dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Pertanyaan untuk mahasiswa Prodi PPKn FKIP Unismuh Makassar adapun pertanyaanya sebagai berikut:

1. Apa yang anda ketahui tentang Persyarikatan Muhammadiyah?
2. Apakah yang anda ketahui tentang nilai-nilai Kemuhammadiyah yang harus di amalkan dalam proses pembelajaran pada saat perkuliahan?
3. Bagaimana pandangan anda tetang nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah baik dalam hal keagamaan, akhlak, dan nilai-nilai nasionalisme yang dimana hal ini perlu di implementasikan dalam proses pembelajaran?
4. Apa kendala anda mempelajari nilai-nilai Kepribadian Kemuhammadiyah pada proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?
5. Apakah wujud dari pengimplementasian nilai-nilai Kepribadian Kemuhammadiyah dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?
6. Mengapa memilih kuliah di Unismuh Makassar?

7. Bagaimana cara anda mengamalkan nilai-nilai keislaman dan Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan kampus?
8. Menurut anda paham Kemuhammadiyah seperti apa yang harus ada dalam diri mahasiswa di jurusan PPKn?
9. Kendala apa yang anda alami selama kuliah di Unismuh Makassar yang dimana nilai-nilai Islam Kemuhammadiyah harus ada dalam setiap proses pembelajaran?
10. Apa yang menjadi harapan anda kedepan tentang penanaman nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?

Makassar, April 2010

AKBAR ABA

## GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN (GBPP)

Mata Kuliah  
Semester  
Dosen Pengampuh MT Kuliah  
Deskripsi Singkat

: Hukum Tata Negara  
:  
: Andi Sugiat.  
: Mata Kuliah ini membahas mengenai pengertian-pengertian dasar dan asas-asas hukum tata negara, sumber hukum tata negara serta struktur umum organisasi negara (Indonesia).  
Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) : Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui, mengerti dan memahami dasar-dasar hukum tata negara Indonesia

N O	TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	WAKTU	DAFTAR PUSTAKA	Metode Pembelajaran
1.	Mengetahui pokok-pokok bahasan dan sistem evaluasi mata kuliah.	Pendahuluan	Penyampaian GBPP/SAP HTN, sistem evaluasi mata kuliah, deskripsi singkat perkuliahan.	10 Menit	GBPP/SAP HTN	
1	Mengetahui dan memahami peristilahan HTN	Peristilahan HTN.	1. Istilah-istilah HTN Bhs Belanda dan Jerman, Inggris, Prancis	100 Menit	B.10, Bab II hlm 12-19; B.1, Bab I, hlm 8 – 14,	
2	Mengetahui dan memahami batasan dan pengertian HTN	Batasan dan Pengertian HTN;	1. Van Vollenhoven; 2. Paul Scholten; 3. Van der Pot; 4. J.H.A Logemann; 5. Wade and Phillips; 6. White Cross Paton;	150 Menit	B.10, Bab II 19-32; B.17, Bab I, hlm.13-26 B. 2 Bab 2. Hlm	1. <i>Small Group Discussion</i>  2. <i>Discovery Learning (DL)</i>



			7. AV Dicey; 8. Maurice Duverger; 9. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim 10. Jimmy Asshiddiqie		21-23	
4.	Mengetahui dan memahami ruang lingkup HTN	Ruang Lingkup HTN;	1. J.H.A Logemann, 2. Usep Ranawidjaja.	150 Menit	B.1, Bab I, hlm 1-8 dan B.10,	1. <i>Cooperative Learning (CL)</i> 2. <i>Collaborative Learning (CbL)</i>
5.	Mengetahui dan memahami hubungan HTN dengan ilmu kenegaraan lainnya	Hubungan HTN dengan Ilmu Kenegaraan Lainnya.	HTN dengan HAN; ilmu negara, dan ilmu Politik	75 Menit	B.1, Bab I, hlm 3-8; B.1, Bab I, hlm 16; B.10, Bab II, hlm 42 – 69.	Discovery Learning Small Group Discussion
7.	Mengenal sumber-sumber HTN	Sumber-sumber Hukum Tata Negara	1. Pengertian Sumber HTN; 2. Pembagian Sumber HTN (materi dan formal); 3. Macam-macam Sumber HTN dalam arti formal <ul style="list-style-type: none"> <li>Hukum Tertulis;</li> <li>Konvensi</li> </ul> Ketatanegaraan; Yurisprudensi	150 Menit	B.1, Bab I, hlm.15-22, B.10, Bab IV hlm 121 – 159; B.2, Bab III, hlm 35-60	Self-Directed Learning Discovery Learning Contextual Instruction

8.	Memahami hukum tertulis, konvensi ketatanegaraan dan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal HTN.	Hukum Tertulis, Konvensi Ketatanegaraan dan Perjanjian Internasional	A. Hukum Tertulis: Jenis Peraturan 1. Konstitusi/ UUD 1945; a. Istilah dan Pengertian; b. Hakikat dan Tujuan Konstitusi; c. Sejarah singkat pemberlakuan konstitusi di Indonesia d. Materi Muatan Konstitusi; e. Perubahan Konstitusi 2. Undang-Undang/Perpu 3. PP; 4. Perpres; dan 5. Perda. B. Konvensi Ketatanegaraan 1. Istilah dan Pengertian 2. Terjadinya Konvensi 3. Kedudukan Konvensi-dalam Sistem Ketatanegaraan	300 Menit 2 x Pertemuan	UU No. 10 Tahun 2004; dan B.9, Bab IV, hlm. 191-217	Self-Directed Learning Discovery Learning Contextual Instruction
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

			<p>Indonesia</p> <p>4. Fungsi Konvensi dalam kaitannya dengan konstitusi</p> <p>5. Dasar-dasar Penaatan Konvensi: Contoh-contoh Konvensi</p> <p>C. Perjanjian Internasional (Traktat): Monisme-dualisme</p>			
9.	Mengetahui dan Memahami struktur umum ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia	<p>Bentuk negara, Bentuk pemerintahan, Sistem pemerintahan, dan Corak pemerintahan</p> <p>1. Bentuk negara : Kesatuan, Federal dan Konfederasi.</p> <p>2. Bentuk Pemerintahan : Republik dan Monarki.</p> <p>3. Sistem Pemerintahan : Parlementer, Presidensial dan Campuran; Corak pemerintahan : Otokrasi dan Demokrasi.</p>	<p>300 Menit</p> <p>2 x Pertemuan</p>	<p>B.15, Bab VI, hlm 165-171; dan B.14, Bab VIII, hlm. 138 – 146.</p>		
10.	Mengetahui Struktur	Struktur Organisasi	1. Pembagian Kekuasaan;	150 Menit	B.4, Bab II-V; B.3	

	Organisasi Negara di Indonesia	Negara di Indonesia	2. Pengertian lembaga negara; 4. Jenis lembaga negara;		Bagian Kedua, hlm 64 – 67. B.7, hlm 1 – 22; B.19, Bab VI, hlm.163-256; dan B.8, Bab II, hlm.29-42, 51-69.	
11.	Mengetahui dan Memahami demokrasi, sistem pengambilan keputusan, sistem kepartaian dan sistem pemilihan	Demokrasi, Sistem Pengambilan keputusan, Sistem Kepartaian dan Sistem Pemilihan.	1. Demokrasi; 2. Sistem Pemilihan; 3. Sistem Kepartaian; 4. Partai Politik;	300 Menit	B.15, Bab IX, hlm.328 – 324; B.17, Bab I, hlm 2 – 4; dan B.14, Bab.X, hlm.159-171.	
12.	Mengetahui dan Memahami perlindungan hak-hak penduduk Indonesia	Perlindungan Hak-hak Penduduk Indonesia	1. Perbedaan Penduduk dan Warga Negara; 2. Asas kewarganegaraan;	150 Menit	B.17, Bab VII, hlm. 291- 297, Bab VII, hlm. 307 –	



		<p>3. Cara-cara memperoleh dan hilangnya kewarganegaraan;</p> <p>4. Pengertian dan Sejarah HAM;</p> <p>5. HAM di Indonesia;</p> <p>5. Tanggung jawab Negara dalam Konteks <i>Welfare State</i>;</p>	324; B.13, Bab I & Bab III; dan B.14, Bab VII, Hlm 120.	
13.	Mengetahui dan Memahami asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah	<p>Prinsip-prinsip penyelenggaran pemerintahan daerah menurut UUD 1945.</p> <p>1. Otonomi daerah</p> <p>2. Hubungan Pusat dan Daerah</p>	150 Menit	<p>B.6, Bab I, hlm 21 – 25; Bab IV, 154 – 170. B.15, Bab VI, hlm. 249 – 284.</p>

### Daftar Pustaka: (Buku)

1. Maxsasai Indra, dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Rafika Aditama Bandung 2011
2. Titok Triwulan Tuitik, Konstruksi Hukum tata Negara Pasca Amandamen UUD 1945, Kencana Media Group, Jakarta 2010
3. Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2006;
4. \_\_\_\_\_, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003
5. \_\_\_\_\_, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2006;
6. \_\_\_\_\_, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2001.
7. \_\_\_\_\_, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
8. \_\_\_\_\_, *Pembahasan UUD 1945*, makalah, 2001.
9. Fimansyah Arifin (et al), *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara*, Konpress, 2005;
10. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konpress, Jakarta, 2005;

11. \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*, Kompas, Jakarta, 2006.
12. \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, PT. BIP- Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007.
13. Joenianto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1982.
14. Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
15. Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
16. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH Universitas Indonesia, 1988.
17. M. Solly Lubis, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Almun, Bandung, 1976.
18. Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
19. Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 2006;
20. Starke, J.G., (*terjemahan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja*), *Pengantar Hukum Internasional 1*, Sinar Grafika, Jakarta, edisi kesepuluh, 2000.
21. Usep Ranawidjaja, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983;
22. Wollhof G.J., *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Timun Mas, Jakarta, 1960.

### **Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan**

UUD 1945 dan perubahannya

UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
JURUSAN / PROGRAM STUDI PPKN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

NAMA MATA KULIAH	KODE MK	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hubungan Internasional	MKB437258		2	6	Maret 2018
OTORISASI	Nama Koordinator Pengembangan RPS	Koordinator RMK	Ka. PRODI		

Muhajir, S.Pd, M.Pd

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi)
---------------------------	--------------------------------------------------------

S7 SI1	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Memiliki ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik dengan diandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal dan ahlak mulia serta memiliki motivasi untuk berbuat bagi kemashlahatan peserta didik dan masyarakat pada umumnya
P1	Menguasai pengetahuan dasar Ilmu Kewarganegaraan, politik, hukum, ekonomi, kenegaraan, sejarah perjuangan bangsa serta nilai, moral dan budaya Pancasila
PPAKI KU1	Penggunaan secara mendalam karakteristik peserta didik dari aspek fisik, psikologi, sosial dan kultural untuk kepentingan pembelajaran Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu-pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni
KU6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar



	<p>KK1</p> <p>Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan</p> <p>KKk7</p> <p>Mengembangkan kurikulum sesuai dengan bidang tugas</p>
	<p>CPMK (Capaian Pembelajaran Lulusan Yang Dibebankan) Pada Mata Kuliah)</p> <p>CPMK1 Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup kajian Studi Hubungan Internasional (KU9, KK4);</p> <p>CPMK2 Mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan dan isu dalam Hubungan Internasional (P3, KU1, KK4);</p> <p>CPMK3 Mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dasar tentang studi Hubungan Internasional (KK4);</p> <p>CPMK4 Mahasiswa mampu mengenali aktor-aktor dalam Hubungan Internasional (S9, KU1);</p> <p>CPMK5 Mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian dan mempresentasikannya (S9, KU2, KU9).</p>
Diskripsi Singkat MK	<p>Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang mempelajari konsep mata kuliah pengantar studi hubungan internasional yang mencakup sejarah HI, perang Dunia, perang Dingin, pasca Perang Dingin, aktor dalam HI, level Analisa HI, <i>state actor</i>, <i>non state actors</i>. Namun sebelumnya terlebih dahulu dibahas beberapa pokok bahasan diantaranya Ruang lingkup kajian Studi Hubungan Internasional, Permasalahan dan isu dalam Hubungan Internasional, Pengetahuan dasar tentang studi Hubungan Internasional, Aktor-aktor dalam Hubungan Internasional yang merupakan pengetahuan dasar (pondasi) yang harus dimiliki pada mata kuliah ini.</p>
Bahan Kajian / Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengantar Studi Hubungan Internasional ; sejarah HI, perang Dunia, perang Dingin, pasca Perang Dingin, aktor dalam HI, level Analisa HI, <i>state actor</i>, <i>non state actors</i>.</li> <li>2. Paradigma dalam studi HI; realis, liberalis, konstruktivis, perspektif Utama dalam studi HI, hobbesian, grotian, kantian.</li> <li>3. Movie time "Tutle can fly".</li> <li>4. Kepentingan nasional; konsep kepentingan nasional, kekuatan nasional, unsur-unsur kekuatan nasional.</li> <li>5. Politik luar negeri; konsep politik luar negeri, perbedaan politik luar negeri dan politik domestik, instrumen politik luar negeri.</li> <li>6. Politik internasional; konsep Politik Internasional, perbedaan Politik internasional dan politik domestik, nasionalisme, regionalisme dan universalisme.</li> <li>7. Ekonomi politik internasional; konsep EPI, isu dan EPI, liga ideologi EPI, MNC's dan ketergantungan ekonomi.</li> <li>8. Diplomasi; konsep diplomasi, diplomasi tradisional dan modern, multitrack diplomasi.</li> <li>9. Organisasi dan hukum internasional; tatanan dunia, fungsi organisasi internasional, hukum internasional, peranan hukum internasional.</li> <li>10. Keamanan internasional; konflik internasional, studi perdamaian, keamanan tradisional dan non tradisional.</li> <li>11. Isu-isu global I; globalisasi vs nasionalisme, isu terorisme.</li> <li>12. Isu-isu global II; isu lingkungan, isu ham, feminisme.</li> </ol>
Daftar Referensi	<p>Utama: Perangkat Keras :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pervita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad, 2005, <i>Pengantar Ilmu Hubungan Internasional</i>, Rosda : Bandung.</li> <li>2. Sorensen, Georg dan Jackson-Robert-1999-<i>Introduction to International Relations</i>, Oxford Univ Press : Oxford.</li> <li>3. Toma, Peter A dan Gorman, Robert F, 1991, <i>International Relations : understanding global issues</i>, Brooks/cole Publishing, California.</li> <li>4. Robert Jackson, Georg Sorensen. (2000). <i>Pengantar Studi Hubungan Internasional</i>. Jakarta: Rezky Bookstore.</li> </ol>



5. Alexander Wendt, dkk. (2014). *Metodologi Ilmu Hubungan Internasional*. Jakarta: Intrans.

**Pendukung:**

6. Ani Soejipto. (2013). *Gender dan Hubungan Internasional*. Jakarta: Jelasutra.
7. P. Anthonius Sitepu. (1993). *Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Graha Ilmu.
8. Scott Burchill. (1990). *Teori-teori Hubungan Internasional*. Jakarta: Nusa Media.
9. Mohammad Shoelhi. (1989). *Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional*. Jakarta: Nusa Media.
10. Umar Suryadi Bakry. (2015). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Surabaya: Pustaka Pelajar.

Media Pembelajaran

Perangkat Lunak:

Perangkat Keras:

Nama Dosen

*Team Teaching*

Pengampu

Mata kuliah

prasyarat

Catatan

Sebelum memulai pembelajaran, setiap dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), diwajibkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa kebersihan kelas dan kedisiplinan mahasiswa dalam berpakaian.
2. Berdoa bersama yang dipimpin oleh dosen atau mahasiswa
3. Membaca Al-Qur'an

Pada proses pembelajaran mengintegrasikan materi perkuliahan dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, nilai-nilai pancasila dan Setelah selesai pembelajaran, setiap dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), diwajibkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan pesan-pesan moral
2. Membaca doa bersama yang dipimpin oleh dosen atau mahasiswa

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria & Bentuk Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1,2	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pengantar Studi Hubungan Internasional	Sejarah HI, Perang Dunia, Perang Dingin, Pasca Perang Dingin, Aktor dalam HI, Level Analisa HI, <i>State Actor</i> , <i>Non state actors</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bentuk: Kuliah</li> <li>Metode: <i>Cooperative Learning</i></li> </ul>	TM: 2x(2x50") BT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang sejarah HI beserta contohnya. (Tugas-1)</li> <li>Makalah: studi kasus perang dunia. (Tugas-2)</li> </ul>	Kriteria: Rubrik kriteria grading Bentuk Non-test: Tulisan makalah Presentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjelaskan tentang sejarah HI</li> <li>Ketepatan menjelaskan tentang <i>non state actors</i></li> <li>Sistematika dan gaya presentasi</li> </ul>	8%
3	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Paradigma dalam Studi HI	Realis, Liberalis, Konstruktivis, Perspektif Utama dalam studi HI, Hobbesian, Grotian, Kantian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bentuk: Kuliah</li> <li>Metode: <i>Project Based Learning</i></li> </ul>	TM: 2x(2x50") BT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang paradigma dalam studi HI beserta contohnya. (Tugas-1)</li> </ul>	Kriteria: Rubrik kriteria grading Bentuk Non-test: Tulisan makalah Presentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjelaskan tentang paradigma dalam studi HI</li> <li>Ketepatan menjelaskan tentang kaitan</li> <li>Sistematika dan gaya presentasi</li> </ul>	6%
4	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Movie time "Tutle can fly"	Movie time "Tutle can fly".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bentuk: Kuliah</li> <li>Metode: <i>Project Based Learning</i></li> </ul>	TM: 2x(2x50") BT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang Movie time "Tutle can fly" beserta contohnya. (Tugas-1)</li> </ul>	Kriteria: Rubrik kriteria grading Bentuk Non-test: Tulisan makalah Presentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjelaskan tentang Movie time "Tutle can fly"</li> <li>Sistematika dan gaya presentasi</li> </ul>	6%

5	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Kepentingan Nasional	Konsep kepentingan nasional, Kekuatan nasional, Unsur-unsur kekuatan nasional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bentuk: Kuliah</li> <li>Metode: <i>Project Based Learning</i></li> </ul>	<b>TM:</b> 2x(2x50") <b>BT:</b> 2x(2x60") <b>BM:</b> 2x(2x60")	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang konsep kepentingan nasional secara mendalam beserta contohnya. (Tugas-1)</li> </ul>	<b>Kriteria:</b> Rubrik kriteria grading <b>Bentuk Non-test:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tulisan makalah</li> <li>Persentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjelaskan tentang konsep kepentingan nasional</li> <li>Ketepatan menjelaskan tentang unsur-unsur kekuatan nasional</li> <li>Sistematis dan gaya persentasi</li> </ul>	6%
6	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Politik Luar Negeri	Konsep politik luar negeri, Perbedaan politik luar negeri dan politik domestik, Instrumen politik luar negeri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bentuk: Kuliah</li> <li>Metode: <i>Project Based Learning</i></li> </ul>	<b>TM:</b> 2x(2x50") <b>BT:</b> 2x(2x60") <b>BM:</b> 2x(2x60")	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang konsep politik luar negeri beserta contohnya. (Tugas-1)</li> </ul>	<b>Kriteria:</b> Rubrik kriteria grading <b>Bentuk Non-test:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tulisan makalah</li> <li>Persentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjelaskan tentang konsep politik luar negeri</li> <li>Ketepatan menjelaskan tentang instrumen politik luar negeri</li> <li>Sistematis dan gaya persentasi</li> </ul>	6%
7	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Politik Internasional	Konsep Politik Internasional, Perbedaan Politik internasional dan politik domestik, Nasionalisme, Regionalisme dan universalisme.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bentuk: Kuliah</li> <li>Metode: <i>Project Based Learning</i></li> </ul>	<b>TM:</b> 2x(2x50") <b>BT:</b> 2x(2x60") <b>BM:</b> 2x(2x60")	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang konsep politik Internasional beserta contohnya. (Tugas-1)</li> </ul>	<b>Kriteria:</b> Rubrik kriteria grading <b>Bentuk Non-test:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tulisan makalah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjelaskan tentang konsep politik internasional</li> <li>Ketepatan menjelaskan tentang regionalisme</li> </ul>	6%



						<ul style="list-style-type: none"><li>• Presentasi</li></ul>	dan universalisme	
						<ul style="list-style-type: none"><li>• Sistematika dan gaya presentasi</li></ul>		
8 Ujian Tengah Semester								
9	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Ekonomi Politik Internasional;	Konsep EPI, isu dan EPI, Liga ideologi EPI, MNC's dan ketergantungan ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bentuk: Kuliah</li><li>• Metode: <i>Project Based Learning</i></li></ul>	TM: 2x(2x50") BT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang konsep EPI beserta contohnya. (Tugas-1)</li></ul>	Kriteria: Rubrik kriteria grading  Bentuk Non-test: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tulisan makalah</li><li>• Presentasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketepatan menjelaskan tentang konsep EPI</li><li>• Ketepatan menjelaskan tentang MNC's dan ketergantungan ekonomi</li><li>• Sistematika dan gaya presentasi</li></ul>	6%
10	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Diplomasi	Konsep diplomasi, Diplomasi tradisional dan modern, Multitrack diplomasi.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bentuk: Kuliah</li><li>• Metode: <i>Project Based Learning</i></li></ul>	TM: 2x(2x50") BT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang konsep diplomasi beserta contohnya. (Tugas-1)</li></ul>	Kriteria: Rubrik kriteria grading  Bentuk Non-test: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tulisan makalah</li><li>• Presentasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketepatan menjelaskan tentang konsep diplomasi</li><li>• Ketepatan menjelaskan tentang multitrack diplomasi</li><li>• Sistematika dan gaya presentasi</li></ul>	7%
11,12	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Organisasi dan Hukum Internasional	Tatanan dunia, Fungsi organisasi internasional, Hukum internasional, Peranan hukum internasional.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bentuk: Kuliah</li><li>• Metode: <i>Cooperative Learning</i></li></ul>	TM: 2x(2x50") BT: 2x(2x60") BM:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang tatanan dunia-beserta contohnya. (Tugas-1)</li><li>• Makalah: studi kasus organisasi</li></ul>	Kriteria: Rubrik kriteria grading  Bentuk Non-test:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketepatan menjelaskan tentang tatanan dunia</li><li>• Ketepatan menjelaskan tentang peranan hukum</li></ul>	8%



13	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Keamanan Internasional	Konflik internasional, Studi perdamaian, Keamanan tradisional dan non tradisional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk: Kuliah</li> <li>• Metode: <i>Project Based Learning</i></li> </ul>	<b>TM:</b> 2x(2x50")  <b>BT:</b> 2x(2x60")  <b>BM:</b> 2x(2x60")	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang konflik internasional beserta contohnya. (Tugas-1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tulisan makalah</li> <li>• Presentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjelaskan tentang konflik internasional</li> <li>• Ketepatan menjelaskan tentang keamanan tradisional dan non tradisional</li> <li>• Sistematika dan gaya presentasi</li> </ul>	7%
14	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Isu-isu Global I	Globalisasi vs nasionalisme, Isu terorisme.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk: Kuliah</li> <li>• Metode: <i>Project Based Learning</i></li> </ul>	<b>TM:</b> 2x(2x50")  <b>BT:</b> 2x(2x60")  <b>BM:</b> 2x(2x60")	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang globalisasi vs nasionalisme beserta contohnya. (Tugas-1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tulisan makalah</li> <li>• Presentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjelaskan tentang globalisasi vs nasionalisme</li> <li>• Ketepatan menjelaskan tentang isu terorisme</li> <li>• Sistematika dan gaya presentasi</li> </ul>	7%
15	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Isu-isu Global II	Isu lingkungan, Isu ham, Feminisme.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk: Kuliah</li> <li>• Metode: <i>Project Based Learning</i></li> </ul>	<b>TM:</b> 2x(2x50")  <b>BT:</b> 2x(2x60")  <b>BM:</b> 2x(2x60")	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang isu lingkungan beserta contohnya. (Tugas-1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tulisan makalah</li> <li>• Presentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjelaskan tentang isu lingkungan</li> <li>• Ketepatan menjelaskan tentang feminisme</li> <li>• Sistematika dan gaya presentasi</li> </ul>	7%

**Catatan:**

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata Kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Kriteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
6. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti



# RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
JURUSAN / PROGRAM STUDI PPKN

## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

NAMA MATA KULIAH	KODE MK	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Tata Negara	MIKB435253		2	5	April 2018

OTORISASI	Nama Koordinator Pengembangan RPS	Koordinator RMK	Ka PRODI
-----------	-----------------------------------	-----------------	----------

	tanda tangan	Tanda tangan	Muhajir, S.Pd, M.Pd
--	--------------	--------------	---------------------

Capaian Pembelajaran (CP)	Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
---------------------------	--------------------------------------------

S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
----	---------------------------------------------------------------------

S11	Memiliki ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik dengan diawasi oleh nilai-nilai kearifan lokal dan abak mulia serta memiliki motivasi untuk berbuat bagi kemaslahatan peserta didik dan masyarakat pada umumnya
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P1	Menguasai pengetahuan dasar Ilmu Kewarganegaraan, politik, hukum, ekonomi, kenegaraan, sejarah perjuangan bangsa serta nilai, moral dan budaya Pancasila
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PPAKI	Penguasaan secara mendalam karakteristik peserta didik dari aspek fisik, psikologi, sosial dan kultural untuk kepentingan pembelajaran
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata-cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KU6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p><b>KKI</b> Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan</p> <p><b>KKK7</b> Mengembangkan kurikulum sesuai dengan bidang tugas</p> <p><b>CPMK (Capaian Pembelajaran Lulusan Yang Dibeberatkan Pada Mata Kuliah)</b></p> <p><b>CPMK1</b> Mahasiswa mampu menjelaskan keberadaan Hukum Tata Negara (HTN) pada umumnya, sejarah, latar belakang, dan ruang lingkupnya, serta kaitannya dengan ilmu negara, ilmu politik, dan Hukum Administrasi Negara (HAN) (KU9, KK4);</p> <p><b>CPMK2</b> Mahasiswa mampu menjelaskan HTN di Indonesia pada khususnya, sejarah, latar belakang, struktur negara R (P3, KU1, KK4);</p> <p><b>CPMK3</b> Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk negara, susunan negara, sistem pemerintahan negara, sistem keparlemenan, sistem pemilu, sistem kepartaian, mayoritas (Ketentuan Umum), dan demokrasi di Indonesia (KK4);</p> <p><b>CPMK4</b> Mahasiswa mampu menjelaskan alasan penggunaan nama Hukum Tata Negara, ruang lingkup, dan cara pendekatan (S9, KU1);</p> <p><b>CPMK5</b> Mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian dan mempresentasikannya (S9, KU2, KU9).</p>
<b>Diskripsi Singkat MK</b>	<p>Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang mempelajari konsep mata kuliah hukum tata negara yang mencakup istilah yang berkaitan dengan HTN, kedudukan HTN dalam skema (Bagan) ilmu hukum, definisi HTN, dan hubungan HTN dengan ilmu negara, dengan ilmu politik, dan HAN. Namun sebelumnya terlebih dahulu dibahas beberapa pokok bahasan diantaranya Keberadaan Hukum Tata Negara (HTN) pada umumnya, sejarah, latar belakang, dan ruang lingkupnya, serta kaitannya dengan ilmu negara, ilmu politik, dan Hukum Administrasi Negara (HAN), HTN di Indonesia pada khususnya, sejarah, latar belakang, struktur negara RI, Bentuk negara, susunan negara, sistem pemerintahan negara, sistem keparlemenan, sistem pemilu, sistem kepartaian, mayoritas (Ketentuan Umum), dan demokrasi di Indonesia, Alasan penggunaan nama Hukum Tata Negara, ruang lingkup, dan cara pendekatan yang merupakan pengetahuan dasar (pondasi) yang harus dimiliki pada mata kuliah ini.</p>
<b>Bahan Kajian / Pokok Bahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Istilah yang berkaitan dengan HTN, kedudukan HTN dalam skema (Bagan) ilmu hukum, definisi HTN, dan hubungan HTN dengan ilmu negara, dengan ilmu politik, dan HAN.</li> <li>2. Istilah sumber hukum, sumber Hukum Tata Negara yang formil dan materil, yaitu Tap. MPRS/MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, dan/atau Peraturan Pelaksana lainnya.</li> <li>3. Istilah dan beberapa pengertian konstitusi, nilai dan sifat konstitusi, perubahan konstitusi, serta sejarah Undang-undang Dasar Indonesia.</li> <li>4. Beberapa azas yang dianut oleh Undang-undang Dasar 1945; azas pancasila, azas kekeluargaan, azas kedaulatan rakyat, azas pembagian kekuasaan, dan azas negara hukum.</li> <li>5. Bentuk negara dan sistem pemerintahan menurut sifatnya, dan menurut pembagian kekuasaan.</li> <li>6. Azas-azas kewarganegaraan; azas <i>Ius Soli</i> dan <i>Ius Sanginis</i>, <i>Bipartide</i> dan <i>Apartide</i>, sejarah kewarganegaraan RI.</li> <li>7. Hak-hak Azasi Manusia (HAM); sejarah HAM dunia, HAM di Indonesia, bentuk hukum tentang HAM, dan HAM dalam UUD NRI tahun 1945.</li> <li>8. Sistem pemilu, berkaitan dengan hubungan pemilu dengan kedaulatan rakyat, tujuan pemilu, sistem perwakilan, dan pemilu di Indonesia.</li> </ol>



9. Mayoritas; mayoritas mutlak (*Absolute Majority*), mayoritas sederhana (*Simple Majority*), dan mayoritas nisbi (*Relative Majority*) serta mayoritas yang dikualifikasi (*Qualified Majority*).
10. Demokrasi, demokrasi substansial dan demokrasi prosedural, nonokrasi, sistem pemerintahan oligarchi, otokrasi, dan diktator.
11. Sejarah ketatanegaraan Indonesia.
12. Sejarah lahirnya orde baru.
13. Sejarah lahirnya orde reformasi.
14. Perbandingan hukum tata negara Indonesia.

**Daftar Referensi**

Utama:

Perangkat keras:

1. Moh. Kusnardi dan Harmally Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN – Fak. Hukum UI, Jakarta. Cetakan ketujuh, 1988.
2. Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia ; Dasar-Dasarnya*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
3. Djamali, R. Abdoel. (2010). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
4. E. Uffecht, Moh. Saleh Djindang. (1983). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
5. Ni'matul Huda. (2007). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

Pendukung:

6. Alwi Wahyudi. (2012). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
7. C.S.T Kansil. (2003). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
8. A. Siti Soetami. (1993). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: PT Eresco.
9. Asihdidiqie, Jinly. (2006). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
10. Mariani Budiardjo. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

**Media Pembelajaran**

Perangkat lunak:

Perangkat keras:

**Nama Dosen**

*Team Teaching*

**Pengampu**

**Mata kuliah**

**prasyarat**

**Catatan**

Sebelum memulai pembelajaran, setiap dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), diwajibkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa kebersihan kelas dan kedisiplinan mahasiswa dalam berpakaian.
2. Berdoa bersama yang dipimpin oleh dosen atau mahasiswa
3. Membaca Al-Qur'an

Pada proses pembelajaran mengintegrasikan materi perkuliahan dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, nilai-nilai pancasila dan Setelah selesai pembelajaran, setiap dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), diwajibkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan pesan-pesan moral
2. Memberikan doa bersama yang dipimpin oleh dosen atau mahasiswa

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria & Bentuk Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Istilah yang Berkaitan dengan HTN, Kedudukan HTN dalam Skema (Bagan) Ilmu Hukum, Definisi HTN, dan Hubungan HTN dengan Ilmu Negara, dengan Ilmu Politik, dan HAN	Istilah yang berkaitan dengan HTN, kedudukan HTN dalam skema (Bagan) ilmu hukum, definisi HTN, dan hubungan HTN dengan ilmu negara, dengan ilmu politik, dan HAN.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bentuk: Kuliah</li> <li>Metode: <i>Discover Learning</i></li> </ul>	TM: 2x(2x50") BT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang istilah yang berkaitan dengan HTN, kedudukan HTN dalam skema (Bagan) ilmu hukum, definisi HTN, dan hubungan HTN dengan ilmu negara, dengan ilmu politik, dan HAN beserta contohnya. (Tugas-1)</li> <li>Makalah: studi kasus secara terminologis. (Tugas-2)</li> </ul>	Kriteria: Rubrik kriteria grading Bentuk Non-test: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tulisan makalah</li> <li>Presentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjelaskan tentang istilah yang berkaitan dengan HTN, kedudukan HTN dalam skema (Bagan) ilmu hukum, definisi HTN, dan hubungan HTN dengan ilmu negara, dengan ilmu politik, dan HAN</li> <li>Sistematika dan gaya presentasi</li> </ul>	6%
2	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Istilah Sumber Hukum, Sumber Hukum Tata Negara, yang Formil dan Materiil, yaitu Tap. MPRS/MPR dan Peraturan Pelaksana lainnya.	Istilah sumber hukum, sumber Hukum Tata Negara yang formil dan materiil, yaitu Tap. MPRS/MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, dan/atau Peraturan Pelaksana lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bentuk: Kuliah</li> <li>Metode: <i>Discover Learning</i></li> </ul>	TM: 2x(2x50") BT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang istilah sumber hukum, sumber Hukum Tata Negara yang formil dan materiil, yaitu Tap. MPRS/MPR,</li> </ul>	Kriteria: Rubrik kriteria grading Bentuk Non-test: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tulisan makalah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjelaskan tentang istilah sumber hukum, sumber Hukum Tata Negara yang formil dan materiil, yaitu Tap.</li> </ul>	6%

	UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, dan/atau Peraturan Pelaksana Lainnya			UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, dan/atau Peraturan Pelaksana lainnya beserta contohnya. (Tugas-1)	• Presentasi	UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, dan/atau Peraturan Pelaksana lainnya		
3	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Istilah dan Beberapa Pengertian Konstitusi, Nilai dan Sifat Konstitusi, Perubahan Konstitusi, serta Sejarah Undang-undang Dasar Indonesia	Istilah dan beberapa pengertian konstitusi, nilai dan sifat konstitusi, perubahan konstitusi, serta sejarah Undang-undang Dasar Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"><li>Bentuk: Kuliah</li><li>Metode: <i>Discovery Learning</i></li></ul>	<b>TM:</b> 2x(2x50")  <b>BT:</b> 2x(2x60")  <b>BM:</b> 2x(2x60")	<ul style="list-style-type: none"><li>Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang istilah dan beberapa pengertian konstitusi, nilai dan sifat konstitusi, perubahan konstitusi, serta sejarah Undang-undang Dasar Indonesia beserta contohnya. (Tugas-1)</li></ul>	<b>Kriteria:</b> Rubrik kriteria grading  <b>Bentuk Non-test:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tulisan makalah</li><li>Presentasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ketepatan menjelaskan tentang istilah dan beberapa pengertian konstitusi, nilai dan sifat konstitusi, perubahan konstitusi, serta sejarah Undang-undang Dasar Indonesia</li><li>Sistematika dan gaya presentasi</li></ul>	5%
4	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Beberapa Azas yang Dianut oleh Undang-undang-Dasar 1945	Azas pancasila, Azas kekeluargaan, Azas kedaulatan rakyat, Azas pembagian kekuasaan, dan Azas negara hukum.	<ul style="list-style-type: none"><li>Bentuk: Kuliah</li><li>Metode: <i>Discovery Learning</i></li></ul>	<b>TM:</b> 2x(2x50")  <b>BT:</b> 2x(2x60")  <b>BM:</b> 2x(2x60")	<ul style="list-style-type: none"><li>Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang azas yang Dianut oleh Undang-undang Dasar 1945 beserta contohnya. (Tugas-1)</li></ul>	<b>Kriteria:</b> Rubrik kriteria grading  <b>Bentuk Non-test:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tulisan makalah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ketepatan menjelaskan tentang azas yang Dianut oleh Undang-undang Dasar 1945</li><li>Sistematika dan gaya presentasi</li></ul>	6%



5	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan Menurut Sifatnya, dan Menurut Pembagian Kekuasaan</p>	<p>Bentuk negara dan sistem pemerintahan menurut sifatnya, dan menurut pembagian kekuasaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bentuk: Kuliah</li> <li>Metode: <i>Discovery Learning</i></li> </ul>	<p>TM: 2x(2x50")</p> <p>BT: 2x(2x60")</p> <p>BM: 2x(2x60")</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan menurut sifatnya, dan menurut pembagian kekuasaan beserta contohnya. (Tugas-1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentasi</li> <li>Kriteria: Rubrik kriteria grading</li> <li>Bentuk Non-test: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tulisan makalah</li> <li>Presentasi</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjelaskan tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan menurut sifatnya, dan menurut pembagian kekuasaan</li> <li>Sistematika dan gaya presentasi</li> </ul>	6%
6	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Azas-azas Kewarganegaraan</p>	<p>Azas <i>Ius Soli</i> dan <i>Ius Sanguinis</i>, <i>Bipatride</i> dan <i>Apatride</i>, Sejarah kewarganegaraan RI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bentuk: Kuliah</li> <li>Metode: <i>Discovery Learning</i></li> </ul>	<p>TM: 2x(2x50")</p> <p>BT: 2x(2x60")</p> <p>BM: 2x(2x60")</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang azas <i>Ius Soli</i> dan <i>Ius Sanguinis</i> beserta contohnya. (Tugas-1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kriteria: Rubrik kriteria grading</li> <li>Bentuk Non-test: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tulisan makalah</li> <li>Presentasi</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjelaskan tentang azas <i>Ius Soli</i> dan <i>Ius Sanguinis</i></li> <li>Ketepatan menjelaskan tentang sejarah kewarganegaraan RI</li> <li>Sistematika dan gaya presentasi</li> </ul>	6%
7	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Hak-hak Azasi Manusia (HAM)</p>	<p>Sejarah HAM dunia, HAM di Indonesia, Bentuk hukum tentang HAM, dan HAM dalam UUD NRI tahun 1945.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bentuk: Kuliah</li> <li>Metode: <i>Discovery Learning</i></li> </ul>	<p>TM: 2x(2x50")</p> <p>BT: 2x(2x60")</p> <p>BM: 2x(2x60")</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang sejarah HAM dunia beserta contohnya. (Tugas-1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kriteria: Rubrik kriteria grading</li> <li>Bentuk Non-test: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tulisan</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjelaskan tentang sejarah HAM dunia</li> <li>Ketepatan menjelaskan tentang HAM dalam UUD</li> </ul>	6%



					<ul style="list-style-type: none"> <li>makalah</li> <li>Presentasi</li> </ul>	NRI tahun 1945 <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistematika dan gaya presentasi</li> </ul>	
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--

8 Ujian Tengah Semester

9	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Sistem Pemilu, Berkaitan dengan Hubungan Pemilu dengan Kedaulatan Rakyat, Tujuan Pemilu, Sistem Perwakilan, dan Pemilu di Indonesia	Sistem pemilu, berkaitan dengan hubungan pemilu dengan kedaulatan rakyat, tujuan pemilu, sistem perwakilan, dan pemilu di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bentuk: Kuliah</li> <li>Metode: <i>Discover Learning</i></li> </ul>	TM: 2x(2x50") BT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang sistem pemilu, berkaitan dengan hubungan pemilu dengan kedaulatan rakyat, tujuan pemilu, sistem perwakilan, dan pemilu di Indonesia beserta contohnya. (Tugas-1)</li> </ul>	<b>Kriteria:</b> Rubrik kriteria grading Bentuk Non-test: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tulisan makalah</li> <li>Presentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjelaskan tentang sistem pemilu, berkaitan dengan hubungan pemilu dengan kedaulatan rakyat, tujuan pemilu, sistem perwakilan, dan pemilu di Indonesia</li> <li>Sistematika dan gaya presentasi</li> </ul>	6%
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

10	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Mayoritas	Mayoritas mutlak ( <i>Absolute Majority</i> ), Mayoritas sederhana ( <i>Simple Majority</i> ), dan Mayoritas nisbi ( <i>Relative Majority</i> ), serta Mayoritas yang dikualifikasir ( <i>Qualified Majority</i> ).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bentuk: Kuliah</li> <li>Metode: <i>Discovery Learning</i></li> </ul>	TM: 2x(2x50") BT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang mayoritas beserta contohnya. (Tugas-1)</li> </ul>	<b>Kriteria:</b> Rubrik kriteria grading Bentuk Non-test: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tulisan makalah</li> <li>Presentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjelaskan tentang mayoritas</li> <li>Sistematika dan gaya presentasi</li> </ul>	6%
----	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

11	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang	Demokrasi, demokrasi substansial dan demokrasi prosedural, demokrasi, sistem pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bentuk: Kuliah</li> <li>Metode: <i>Discover</i></li> </ul>	TM: 2x(2x50") BT:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang demokrasi,</li> </ul>	<b>Kriteria:</b> Rubrik kriteria grading	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjelaskan tentang demokrasi,</li> </ul>	6%
----	-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----

	Demokrasi, Demokrasi substansial dan demokrasi Prosedural, Nomokrasi, Sistem Pemerintahan Oligarchi, Otokrasi, dan Diktator	oligarchi, otokrasi, dan diktator.	<i>ry Learning</i>	2x(2x60") BM: 2x(2x60")	demokrasi substansial dan demokrasi prosedural, nomokrasi, sistem pemerintahan oligarchi, otokrasi, dan diktator beserta contohnya. (Tugas-1)	<b>Bentuk Non-test:</b> • Tulisan makalah • Presentasi	demokrasi substansial dan demokrasi prosedural, nomokrasi, sistem pemerintahan oligarchi, otokrasi, dan diktator • Sistematika dan gaya presentasi	
12	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Sejarah Ketatanegaraan Indonesia	Sejarah ketatanegaraan Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bentuk: <i>Kuliah</i></li> <li>Metode: <i>Discovering Learning</i></li> </ul>	TM: 2x(2x50") BT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia beserta contohnya. (Tugas-1)</li> </ul>	<b>Kriteria:</b> Rubrik kriteria grading <b>Bentuk Non-test:</b> • Tulisan makalah • Presentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjelaskan tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia</li> <li>Sistematika dan gaya presentasi</li> </ul>	6%
13	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Sejarah Lahinya Orde Baru	Sejarah lahinya orde baru.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bentuk: <i>Kuliah</i></li> <li>Metode: <i>Discovering Learning</i></li> </ul>	TM: 2x(2x50") BT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang sejarah lahinya orde baru beserta contohnya. (Tugas-1)</li> </ul>	<b>Kriteria:</b> Rubrik kriteria grading <b>Bentuk Non-test:</b> • Tulisan makalah • Presentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjelaskan tentang sejarah lahinya orde baru</li> <li>Sistematika dan gaya presentasi</li> </ul>	6%
14	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Sejarah	Sejarah lahinya orde reformasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bentuk: <i>Kuliah</i></li> <li>Metode: <i>Discovering Learning</i></li> </ul>	TM: 2x(2x50") BT: 2x(2x60")	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang sejarah lahinya orde</li> </ul>	<b>Kriteria:</b> Rubrik kriteria grading	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjelaskan tentang sejarah lahinya orde</li> </ul>	6%

	Lahirnya Orde Reformasi		ry Learnin g	2x(2x60") BM: 2x(2x60")	reformasi beserta contohnya. (Tugas-1)	Bentuk Non- test: • Tulisan makalah • Presentasi	reformasi • Sistematis dan gaya presentasi	
15	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Perbandingan Hukum Tata Negara Indonesia	Perbandingan hukum tata negara Indonesia.	• Bentuk: Kuliah • Metode: Discover ry Learnin g	TM: 2x(2x50") BT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	• Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang perbandingan hukum tata negara Indonesia beserta contohnya. (Tugas-1)	Kriteria: Rubrik kriteria grading Bentuk Non- test: • Tulisan makalah • Presentasi	• Ketepatan menjelaskan tentang perbandingan hukum tata negara Indonesia • Sistematis dan gaya presentasi	6%
16	Ujian Akhir Semester							90%

**Catatan:**

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, pengetahuan, keterampilan dan kompetensi sesuai dengan jenjang studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Kriteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolak ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
6. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

---

**SILABUS**  
**MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

**A. IDENTITAS MATA KULIAH**

Nama Mata Kuliah	: Pendidikan Kewarganegaraan
Nomor Kode	:
Jumlah SKS	: 2 SKS (100 menit)
Semester	: Kedua dan Ketiga
Prodi	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelompok Mata Kuliah	: MKP (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian)
Jurusan/Program	: Semua Jurusan/S1 (Dik dan Nondik)
Prasyarat	: Tidak ada
Dosen	: TIM Dosen PKN Unismuh Makassar

**B. Tujuan Umum MK PKN**

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan memiliki wawasan dan kesadaran kebangsaan yang tinggi, mampu bertindak cerdas, berwawasan global, berjiwa patriotik, berfikir komprehensif-integral dengan berlandaskan Falsafah Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.



### **C. Deskripsi Isi MK PKN**

Dalam perkuliahan ini dibahas esensi PKN (Landasan filosofis, historis, Visi, Misi, Tujuan, Kompetensi PKN ), Dinamika Negara Kebangsaan, Pancasila sebagai Dasar dan Falsafah Negara, Norma/Kaidah yang berlaku di masyarakat, Kesadaran Berkonstitusi, Hak Asasi dan Kewajiban dasar Manusia, Kesadaran Berdemokrasi, Geopolitik dan Geostrategi Indonesia, Politik dan Strategi Nasional, Pembangunan Daerah dalam Kerangka NKRI.

### **D. Proses Pembelajaran**

Pendekatan : Ekspositori dan Inquiri  
Metode : Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi, Tugas, Pemecahan Masalah.  
Tugas : Evaluasi tiap Bahasan, Makalah, Presentasi dan Diskusi  
Media : OHP, LCD, Jurnal.

### **E. Evaluasi**

Nilai akhir (NA) mahasiswa pada mata kuliah ini terdiri atas :

1. Keaktifan di kelas meliputi kehadiran di kelas dan keaktifan dalam diskusi, tanya jawab (40 %)
2. Nilai Tugas (individu, kelompok) dan partisipasi dalam diskusi dengan Bobot 25%
3. Nilai Kedisiplinan (termasuk kehadiran kuliah ) dengan Bobot 15%
4. Nilai Ujian Tengah Semester (UTS) dengan bobot 10 %
5. Nilai Ujian Akhir Semester (UAS) dengan Bobot 10 %

Nilai Akhir (NA) diperoleh dengan mengakumulasi setiap aspek nilai sesuai dengan bobotnya.

Nilai Akhir (NA) yang berbentuk angka (0-100), kemudian dikonversikan kedalam huruf mutu A, B, C, D, atau E dengan menggunakan Sistem Penilaian Relatif (Gabungan PAP dan PAN)

### **F. Rincian Materi Perkuliahan Tiap Pertemuan**

1. Pengantar Perkuliahan (pertemuan ke-1)
2. Dinamika Negara Kebangsaan Indonesia (Pertemuan ke-2)

3. Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara (Pertemuan ke-3)
4. Membina Kesadaran Berkonstitusi (pertemuan ke- 4 dan 5)
6. Norma/kaidah yang berlaku dalam masyarakat (pertemuan 6)
7. Hak dan Kewajiban Warga Negara (Pertemuan ke-7 )
8. Demokrasi di Indonesia (pertemuan ke-8)
9. Ujian Tengah Semester ( Pertemuan ke-9)
10. Geopolitik Indonesia (pertemuan ke-10 dan 11 )
11. Geostrategi Indonesia (pertemuan ke-11 dan 12)
12. Politik dan Strategi Nasional ( pertemuan ke-13 dan 14 )
13. Pembangunan Daerah dalam Kerangka NKRI (Pertemuan ke-15)
14. Ujian Akhir Semester ( Pertemuan ke-16)

#### **G. Daftar Literatur**

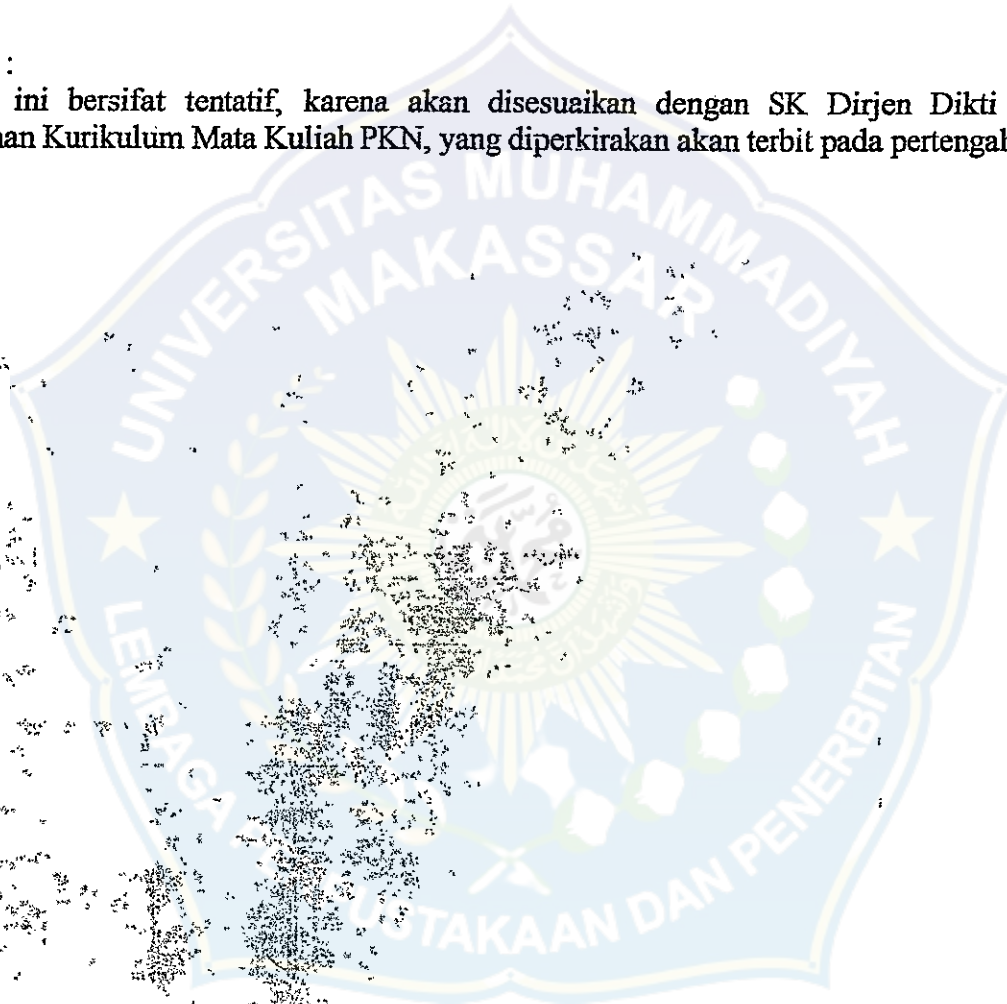
1. Undang-undang Dasar 1945 pasca amandemen
2. Instrumen-instrumen HAM Nasional dan Internasional (PBB)
3. Muchtar K (1983), Hukum Laut Internasional, Bandung : PT Bina Cipta
4. Notonagoro (1980), Beberapa hal Mengenai Falsafah Pancasila, Pancuran Tujuh, Jakarta.
5. Tim Dikti & Lemhannas (2003), Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: PT. Gramedia.
6. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI
8. Undang-undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
9. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 jo.UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
10. Buku - buku teks dalam dan luar negeri yang relevan dengan pokok bahasan, terutama yang dianjurkan oleh dosen di kelas masing-masing.

Makassar, 12 Januari 2017  
Dosen Pengampu,

Dr. Drs. A. Rahim, SH, M.Hum

Catatan :

Silabus ini bersifat tentatif, karena akan disesuaikan dengan SK Dirjen Dikti tentang Perubahan Kurikulum Mata Kuliah PKN, yang diperkirakan akan terbit pada pertengahan Juli



# SILABUS

- I.** Nama Mata kuliah : **HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA**  
Kode : **HTN 005**  
Fakultas : **Syariah**  
Prodi : **Hukum Tata Negara**  
Program : **S.1**  
Bobot sks : **2 SKS**  
Sifat : **Wajib**

**II. Deskripsi Mata Kuliah**

Hukum Kelembagaan Negara (HKN) sebagai salah satu Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan Hukum (MKKKH) memiliki posisi untuk mendukung pengetahuan dan keterampilan mahasiswa mengenai Mata Kuliah Hukum Kelembagaan Negara memuat materi mengenai berbagai masalah ketatanegaraan yang berkaitan dengan kelembagaan Negara terutama mengenai teori - teoridan perkembangan lembaga Negara, konsepsi lembaga Negara, jenis-jenis, lembaga Negara, hubungan antar lembaga Negara, dan sengketa kewenangan lembaga Negara.

**III. Tolak Ukur Indikator Kompetensi (Target Hasil Belajar)**

1. Mahasiswa dapat memahami konsep,historis, definisi, kedudukan, fungsi, dan sumber hukum Hukum Kelembagaan Negara.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan keseluruhan lembaga-lembaga negara dalam sistem hukum Indonesia
3. Mahasiswa dapat memahamidan menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan kelembagaan negara dan pengertian hukum kelembagaan negara.
4. Mahasiswa dapat memahami mengenai hubungan antar lembaga negara dan mekanisme penyelesaian sengketa antar lembaga negara.
5. Mengenal dan menjelaskan konsep hukum kelembagaan negara dan instrumen kelembagaan negara di Indonesia.
6. Mahasiswa mampu menjelaskan keseluruhan lembaga-lembaga negara dalam sistem hukum Indonesia

**IV. Topik Inti Materi Pembelajaran**

1. Pendahuluan
  - 1) Konsep Lembaga Negara
  - 2) Perkembangan Organisasi Negara
  - 3) Teori penataan lembaga negara
2. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan
  - 1) Bentuk Negara
  - 2) Bentuk Pemerintahan
  - 3) Sistem pemerintahan



3. Lembaga – lembaga Negara di Indonesia
  - 1) Jenis – jenis Lembaga Negara dalam UUD 1945 (Sebelum dan Sesudah Amandemen)
  - 2) Lembaga Negara lainnya dan Lembaga Daerah
  - 3) Kedudukan dan wewenang lembaga Negara
  - 4) Tugas, fungsi dan batasan kekuasaan
4. Hubungan antar lembaga Negara
  - 1) Hubungan Keanggotaan
  - 2) Hubungan Fungsional
  - 3) Hubungan Pengawasan
  - 4) Hubungan yang berkaitan penyelesaian sengketa
  - 5) Hubungan berkaitan dengan pelaporan atau pertanggungjawaban
5. Lembaga Eksekutif (Lembaga Kepresidenan)
  - 1) Pengertian
  - 2) Organisasi, Kedudukan dan Kewenangan
  - 3) Hubungan Presiden dengan Wakil Presiden
  - 4) Hubungan Presiden dengan menteri negara
6. Lembaga Legislatif
  - 1) Pengertian
  - 2) Jenis, Kedudukan dan Kewenangan
  - 3) Hubungan antar lembaga Legislatif
7. Lembaga Yudikatif
  - 1) Pengertian
  - 2) Jenis, Kedudukan dan Kewenangan
  - 3) Hubungan antar lembaga yudikatif
8. Komisi – Komisi Negara
  - 1) Pengertian dan Landasan Hukum
  - 2) Jenis, Kedudukan dan Kewenangan
  - 3) Hubungan antar komisi dengan lembaga negara lainnya
9. Kementerian Negara
  - 1) Pengertian dan Landasan Hukum
  - 2) Pembentukan, Pengubahan dan Pembubaran
  - 3) Jenis, Kedudukan dan Kewenangan
  - 4) Susunan Organisasi dan Hubungan antar Kementerian dengan lembaga negara lainnya
10. Lembaga Negara dalam Islam
  - 1) Pengertian dan Landasan Hukum
  - 2) Jenis, Kedudukan dan Kewenangan
  - 3) Susunan Organisasi dan Hubungan antar lembaga negara
  - 4) Kelembagaan negara Islam dalam Dunia Modern
11. Sengketa kewenangan lembaga Negara
  - 1) Istilah dan Pengertian sengketa kewenangan lembaga Negara
  - 2) Faktorfaktor penyebab terjadinya sengketa kewenangan lembaga Negara
  - 3) Obyek sengketa kewenangan lembaga Negara

- 4) Lembaga Negara yang dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga Negara.
- 5) Lembaga Negara yang berwenang menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga Negara
- 6) Mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga Negara

## V. Metode Pembelajaran

1. Pendekatan : Proses, ekspositori, copy the master, dan CTL
2. Metode : Ceramah, tanya jawab, diskusi, pemecahan masalah.
3. Tugas : Artikel ilmiah, makalah, review artikel, Penelitian, buku, atau karya tulis creative writing, dan seminar Kelas
4. Media : Portofolio, fotokopi dokumen otentik dari berbagai sumber, Dan LCD / Power Point

## VI. Alternative Media Pembelajaran

1. Papan Tulis
2. OHP
3. Foto Copy Bahan
4. Ruang Kelas
5. Perpustakaan

## VII. Evaluasi dan Kriteria Penilaian

Penilaian atas prestasi mahasiswa didasarkan pada kehadiran, aktivitas, diskusi, tugas-tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.

1. Sikap : Kehadiran (lebih dari 80%), interaksi di dalam kelas, diskusi: 10 %.
2. Proses : Tugas mandiri, terstruktur, portofolio: 20 %.
3. UTS : Tes tulis tengah semester 25 %
4. UAS : Tes tulis akhir semester 45 %.

## VIII. Rujukan

- Abdul., H. Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: UII-Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta; PT Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, cet- ke 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

- \_\_\_\_\_. *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Jakarta : Konstitusi Press, 2005
- \_\_\_\_\_. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005.
- Basah, Sjachran., *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Cet- ke 3, Bandung: PT. Alumni, 1997.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Fachruddin, Irfan *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004.
- Farida, Maria Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan (Bagian I): Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.
- Firmansyah Arifin, *Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatan-catatan Untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. Cet. Pertama. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2004.
- Hadjon, Philipus M. dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia; Introduction to the Indonesian Administrative Law*, cet ke-10, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara Menurut UUD 1945 Suatu Analisis Hukum dan Kenegaraan*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Hamidi, Jazim., dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Hoessein, Bhenyamin., *Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*, cet- ke 2, Depok: DIA FISIP UI, 2011.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Huda, Ni'matul, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrai*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Koesnardi, Moh., dan Bintang R. Saragih, *Susunan pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar-1945*, cet-ke VII, Jakarta: PT Gramedia, 1994.
- Le, AP Sueur and JW. Herberg, *Constitutional- & Administrative Law*, London: Cavendish Publishing Limited, 1995.
- Lopa, Baharuddin dan Andi Hamzah, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Lotulung, Paulus E. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mahfud, Moh. M.D., *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: Rineka Cipta, 2001.
- Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan*. Cet. Ke-2. Yogyakarta, FH-UII Press, 2003.
- Marbun, SF. dan Moh. Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty, 1987.

- Mauarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Nugraha, Safri., dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Philipus M Hadjon et al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press Yogyakarta, 2001.
- Philipus M Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum (Weten rechtmatig Bestuur)*, Yuridika Surabaya, 1993.
- Purbopranoto, Kuntjoro., *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*, Bandung: Angkasa Offset Bandung, 1981.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2003.
- Sibuea, Hotma P., *Asas Negara Hukum, Peraturan kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



31/05/A.6-II/I/1441/2019  
1 (satu) rangkap Proposal  
Izin Penelitian

11 Jumadil Awwal 1441 H  
06 Januari 2020 M

Kepada Yth,  
Saudara  
No. Stambuk  
Fakultas/ Prodi  
di -

: **AKBAR ABA**  
: **105 43 00119-15**  
: **FKIP/ Pendidikan Pancasila dan Kewrganegaraan**

Tempat


Berdasarkan surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 1596/FKIP/A.I-II/I/1441/2020 Tanggal 06 Januari 2020, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di atas diberi izin untuk melakukan Penelitian di Universitas Muhammadiyah Makassar, dan diharuskan menyerahkan satu rangkap hasil penelitiannya yang berjudul, *Implementasi Nilai Kemuhamandiyahan dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.*

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 11 Januari s/d 11 Maret 2020

Sehubungan dengan hal tersebut, yang bersangkutan akan melaksanakan penelitian/ Pengabdian Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

التحية والوداع

Ketua LP3M,  
  
**Dr. J. Abubakar Idhan, MP.**  
NBM 101 7716




Tembusan yth;

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip

# LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Akbar Aba	Pembimbing II : Dra. Jumiaty Nur, M.Pd.
NIM : 10543 0011 915	NIDN : 0908066702
Program Studi : PPKn	

**Judul Penelitian :** IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEMUHAMMADIYAHAN DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR.

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi & Catatan Pembimbing	Paraf pembimbing
1.	20/01/2020	Perbaiki metode penelitian dan hasil penelitian	
2.	19/02/2020	Perbaiki Abstrak dan lembar Observasi	
3.	2/06/2020	ACC	
4.			
5.			





## Catatan:

1. Kartu konsultasi dibuat dua rangkap untuk pembimbing I dan II, dilampirkan saat seminar.
2. \*) Sesuaikan dengan status pembimbing, sebagai Pembimbing I atau Pembimbing II.
3. Minimal konsultasi sebanyak 3 x
4. Dapat diperbanyak bila diperlukan

## LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Akbar Aba	Pembimbing I : Dr. Muhajir, M.Pd.
NIM : 10543 0011 915	NIDN : 090506790
Program Studi : PPKn	

**Judul Penelitian :** IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEMUHAMMADIYAHAN DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR.

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi & Catatan Pembimbing	Paraf pembimbing
1.	4/7/20	perbaikan sesuai Catatan	
2.	4/7/20	perbaikan sesuai Catatan	
3.	16/7/20	perbaikan sesuai Catatan	
4.	20/7/20	Ace	
5.			

### Catatan:

1. Kartu konsultasi dibuat dua rangkap untuk pembimbing I dan II, dilampirkan saat seminar.
2. \*) Sesuai dengan status pembimbing, sebagai Pembimbing I atau Pembimbing II.
3. Minimal konsultasi sebanyak 3 x
4. Dapat diperbanyak bila diperlukan



# DOKUMENTASI



*Kampus Unismuh Makassar*



*Wawancara bersama WD IV FKIP Unismuh Makassar*





*Wawancara bersama dosen Prodi PPKn*



*Wawancara bersama dosen Prodi PPKn*



*Observasi langsung di kelas sekaligus wawancara bersama mahasiswa Prodi PPKn*



*Observasi langsung di kelas sekaligus wawancara bersama mahasiswa Prodi PPKn*



## RIWAYAT HIDUP



**AKBAR ABA** Lahir di Massala 29 Novemeber 1996. Penulis adalah anak kelima dari 5 bersaudara buah hati pasangan Aba dan Harsia. Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 188 Sololompeng pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2009,

kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Lilirilau pada tahun 2009 dan tamat pada tahun 2012. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Liliriaja (sekarang SMA Negeri 2 Soppeng) dan tamat pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar), dan menjadi mahasiswa pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pernah menjabat sebagai Anggota Bidang Kemuhammadiyah BEM FKIP priode 2016-2017, Ketua Bidang Kemuhammadiyah HIMA Prodi PPKn periode 2016-2017, Ketua Bidang Pengembangan Organisasi, Sekertaris Bidang Kader IMM FKIP priode 2017-2018 dan Sekretaris Umum IMM FKIP Unismuh Makassar periode 2018-2019, dan selesai pada tahun 2019.